

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tembelang Tahun 2021 ini dibuat sesuai Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan tiap Pimpinan Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, bahwa peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi dalam menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidaktercapaian misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2021, maka Camat Tembelang membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tembelang. Diharapkan LKjIP ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerjanya masing- masing di masa yang akan datang.

Tembelang, Januari 2022


CAMAT TEMBELANG
AGUS SANTOSO, S.Sos
Pembina
NIP. 197303291992011001

BAB I PENDAHULUAN

Perbaikan *governance* dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan yang berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP diimplementasikan secara "*self assesment*" oleh masing-masing instansi pemerintah, ini berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Pelaksanaan sistem dengan mekanisme semacam itu, memerlukan evaluasi dari pihak yang lebih independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

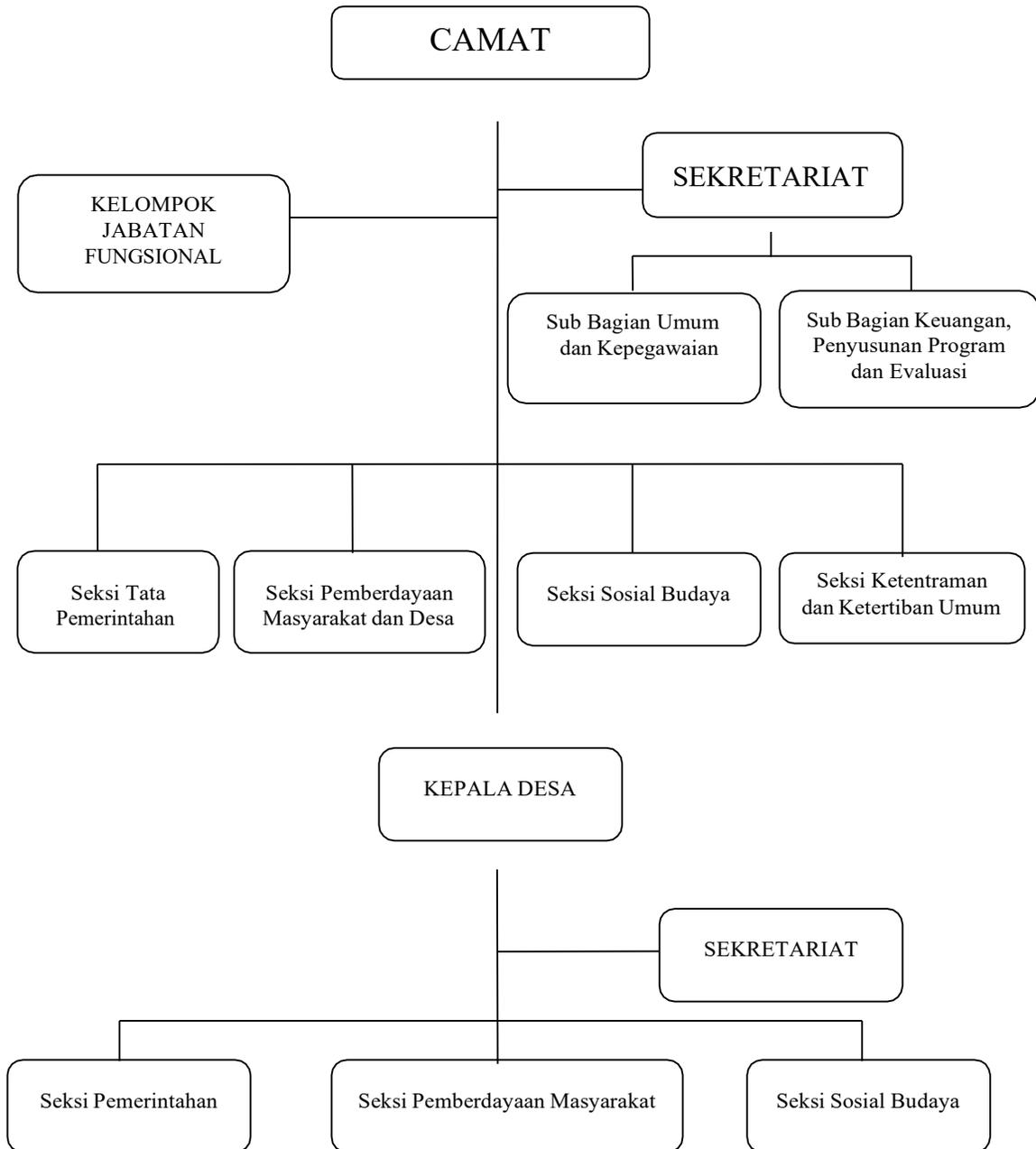
Akuntabilitas merupakan perwujudan dari kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Pada bagian pendahuluan ini disampaikan dasar-dasar pelaksanaan kerja organisasi, aspek strategis, permasalahan dan struktur penyampaian laporan yang kesemuanya akan kami sajikan secara terstruktur.

A. STRUKTUR ORGANISASI

Keberadaan Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kecamatan Tembelang



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tembelang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Jombang, sebagai berikut:

B.1. Camat

Tugas pokok Camat adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah di wilayah kerjanya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan kewenangan wajib Kabupaten dan kewenangan lainnya yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. Penyelenggaraan tugas pemerintahan umum, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan pemerintahan, pertanian, sosial budaya, lingkungan hidup dan pertanahan;
- c. Pembinaan administrasi pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum, Kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama;
- e. Penyelenggaraan perencanaan program pembangunan dan perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup dan sosial budaya di lingkungan Kecamatan;
- f. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di wilayah kerjanya;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-instansi terkait di wilayah kerjanya;
- h. Pelaksanaan tugas pembantuan;
- i. Penyusunan program, ketatausahaan dan rumah tangga Kecamatan.

B.2. Sekretaris

Tugas pokok Sekretaris adalah melaksanakan sebagian tugas Camat dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, aset, penyusunan program dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;

- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugastugas Seksi;
- h. Pengelolaan kearsipan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
- j. Pelaksanaan pengelolaan aset Kecamatan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

B.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum adalah membantu Sekretaris untuk mengelola ketatausahaan dan administrasi umum di Kecamatan Tembelang. Berikut adalah fungsi atau tugas Sub Bagian Umum :

- a. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang/jasa;
- d. Memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor serta melaksanakan kegiatan keprotokolan dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. Menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karir pegawai, kesejahteraan dan pemberhentian pegawai di lingkungan kecamatan;
- f. Menghimpun data aset dan melaksanakan ketatausahaan barang;
- g. Mengkoordinasikan dan menyusun standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal;
- h. Melaksanakan program dan pembinaan pelayanan dibidang informasi dan komunikasi;
- i. Melaksanakan kegiatan kehumasan, publikasi dan dokumentasi;
- j. Membuat laporan hasil pengadaan barang/jasa; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B.2.2 Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi mempunyai fungsi membantu Sekretaris untuk menyusun dan melaporkan kegiatan di Kecamatan Tembelang. Berikut adalah fungsi atau tugas Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Evaluasi :

- a. Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- b. Menyusun rencana program dan kegiatan jangka panjang, jangka menengah serta tahunan;
- c. Melaksanakan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;
- e. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta melaksanakan tata usaha keuangan;
- f. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;
- g. Memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;
- h. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B.3. Seksi Tata Pemerintahan

Tugas pokok Seksi Tata Pemerintahan adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan umum. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal serta instansi di lingkungan Kecamatan di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- b. Penyelenggaraan pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil;
- c. Pelaksanaan urusan wajib Kabupaten dan urusan lain tingkat Kecamatan sesuai bidangnya;

- d. Penyelenggaraan pembinaan aparatur dan administrasi pemerintahan desa;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
- g. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- h. Pelaksanaan perencanaan, pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan dan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal kepada masyarakat di kecamatan;
- i. Pelaksanaan tugas pembantuan;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

B.4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tugas pokok Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai fungsi:

- a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dan forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan Kecamatan;
- b. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat serta terhadap perangkat desa dan kelurahan serta tertib administrasi pemerintahan Desa dan Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat, pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah maupun swasta;

- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati dengan tembusan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat;
- f. Pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi bidang PKK;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

B.5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas pokok Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program guna menjaga ketentraman serta ketertiban masyarakat;
- b. Pelaksanaan pembinaan di bidang ketentraman dan ketertiban Masyarakat;
- c. Penyelenggaraan pembinaan perangkat Kecamatan, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan pengendalian operasional Polisi Pamong Praja Kecamatan;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah, pihak lain termasuk Polri/TNI dan Pemuka agama di wilayah kerjanya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di Kecamatan;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- h. Menyusun laporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
- i. Pelaksanaan pengamanan kantor Kecamatan dan rumah dinas Camat;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

B.6. Seksi Sosial Budaya

Tugas pokok Seksi Sosial Budaya adalah membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan sosial budaya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Seksi Sosial Budaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengumpulan bahan dan data pelaksanaan, evaluasi di bidang sosial budaya;
- b. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang sosial budaya;
- c. Penyelenggaraan administrasi di bidang sosial budaya;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi terhadap lembaga keagamaan, pendidikan, budaya, pemuda, olahraga, ketenagakerjaan dan kesehatan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan sosial dan pemberdayaan perempuan;
- f. Penyelenggaraan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan di tingkat Kecamatan.
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

C. Isu Strategis

Isu strategis berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang serta berdasarkan dinamika lingkungan strategis adalah sebagai berikut :

- 1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah kecamatan.
- 2. Pelayanan Prima Kecamatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Jombang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, efektif, ramah, inovatif dan akuntabel, memiliki legalitas hukum dan

tentunya dengan tetap mendasarkan pada Standart Operasional Prosedur (SOP) serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif dikomunikasikan kepada masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan terhadap pelayanan publik.

3. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur.

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima (*service excelent*) harus diimbangi dengan citra organisasi dengan kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan publik. Sumber Daya Aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *Good Government*, mewujudkan budaya kerja aparatur dengan penekanan kepada semangat kerja serta aparatur sebagai "*pelayanan masyarakat*".

Sumber Daya Aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan menekankan pada transparansi dan akuntabilitas.

Pendayagunaan aparatur pemerintah Kecamatan Tembelang juga mencakup pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi upaya pembinaan, penyempurnaan, pengawasan dan pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur.

4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Manajemen keuangan dan barang daerah menjadi hal strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan, karena sebagai salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan melalui pelaksanaan manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah yang berorientasi kepada kinerja untuk mendukung terciptanya *Good Government* di Kecamatan.

Melalui penataan perencanaan, penganggaran dan pengeluaran, agar pengelolaan anggaran dilaksanakan dengan konsep *Valur For Money* sehingga tercipta akuntabilitas publik. Demikian pula

dengan manajemen barang daerah dilaksanakan melalui tahapan perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan dan penghapusan harus diketahui dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Meningkatkan fungsi kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mengkoordinir kegiatan yang dilaksanakan di desa.
6. Kecamatan Tembelang merupakan kawasan dengan tipologi pertanian menuju pengembangan wilayah industri. Hal ini menjadi potensi ke depan bagi masyarakat dalam mencari lapangan kerja.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, tidak terlepas dari beberapa masalah utama yang dihadapi, diantaranya adalah:

1. Keterbatasan anggaran dana yang tertuang pada DPA Kecamatan Tembelang menjadikan kebutuhan Kecamatan Tembelang belum bisa terakomodasi seluruhnya;
2. Fasilitas penunjang seperti peralatan kantor dan peralatan lainnya masih kurang;
3. Sumber daya manusia yang akan menjalankan pelayanan dan pembangunan yang ada di Kecamatan Tembelang masih terbatas;
4. Perlu adanya koordinasi dengan dinas terkait apabila terdapat program yang berkaitan dengan dinas, sehingga pihak kecamatan tidak mengalami kesulitan dalam perencanaan dan pelaksanaan program;
5. Perlu adanya limpahan kewenangan dari dinas terkait program tertentu sehingga kecamatan mampu melaksanakan program secara maksimal dan tidak terjadi tumpang tindih.

D. CASCADING KINERJA

Sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi setiap perangkat daerah dengan berpedoman pada visi dan misi RPJMD. Tujuan dan sasaran RPJMD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Kecamatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Kecamatan Tembelang Tahun 2018 - 2023 pelaksanaan

tugas dan fungsi Kecamatan Tembelang terkait dengan pencapaian Visi dan misi pertama dari RPJMD Kabupaten Jombang adalah

“Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing”

Untuk mencapai visi tersebut, Kecamatan Tembelang melaksanakan misi ke 1 (satu) dari Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional”** dengan indikator

1. Indeks Reformasi Birokrasi
2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik

E. PETA PROSES BISNIS

Kecamatan Tembelang telah menerapkan peta Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan, sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi, sebagaimana terlampir.

F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan surat Inspektorat Kabupaten Jombang tanggal 3 November 2021 nomor : X.700/37/415.15/2021 hal Laporan Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Tahun 2020 s.d Semester I Tahun 2021 bahwa nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tembelang sebesar 70,10 dengan kategori “BB” atau “Sangat Baik”.

Adapun rinciannya sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30%	23,58
2	Pengukuran Kinerja	25%	17,50
3	Pelaporan Kinerja	15%	10,97
4	Evaluasi Internal	10%	6,43
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja	20%	11,63
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja		100%	70,10

Dari uraian di atas ada beberapa catatan hasil evaluasi SAKIP sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

- a. target Kinerja belum ditetapkan dengan baik
- b. Program/Kegiatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan/sasaran
- c. Dokumen Renstra belum sepenuhnya memuat hal yang seharusnya disajikan
- d. Dokumen Renstra belum digunakan sebagai acuan penyusunan Anggaran
- e. Target Jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan
- f. Dokumen Renstra dan Indikator Kinerja Utama belum direviu secara berkala
- g. Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan
- h. Rencana aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala
- i. Rencana aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan
- j. Perjanjian Kinerja belum dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat Eselon III dan IV

1. Pengukuran Kinerja

- a. Pengukuran Kinerja sudah dilakukan secara berjenjang, namun belum dapat ditelusuri sampai dengan sumbernya
- b. Pengumpulan data kinerja sudah dapat dilakukan, namun belum dapat diandalkan
- c. Pengukuran kinerja sudah ada, namun belum menggunakan teknologi informasi
- d. Indikator Kinerja Utama belum dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran
- e. Hasil monitoring dan pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas sudah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward, namun belum menjadi dasar pemberian punishment

- f. Reviu atas Indikator Kinerja Utama belum menjadi sebab perbaikan yang signifikan atas perencanaan selanjutnya
- g. Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi hanya menyajikan kesimpulan, namun belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

2. Pelaporan Kinerja

- a. Laporan kinerja belum menyajikan Informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya, Perbandingan realisasi pencapaian kinerja dengan tahun sebelumnya
- b. Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum dapat diandalkan
- c. Pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja belum dipergunakan dalam perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, peningkatan dan penilaian kinerja

3. Evaluasi Internal

- a. Evaluasi program yang dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program belum menyimpulkan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi
- b. Evaluasi program yang dilaksanakan belum menginformasikan pengendalian kinerja, alternatif kinerja, dan perbaikan setiap periode
- c. Hasil evaluasi rencana aksi belum ditindaklanjuti dengan Langkah-langkah nyata

4. Capaian Kinerja

- a. Berdasarkan laporan Kinerja Instansi Tahun 2020, rata-rata capaian IKU diperoleh sebesar 91,84% dengan rincian :
 - * Capaian nilai Sinergitas sebesar 84,20% (target 76 realisasi 63,99)
 - * Capaian Nilai Evaluasi SAKIP sebesar 99,48% (target 61,91 realisasi 61,59)

Berdasarkan catatan hasil evaluasi di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan SAKIP OPD, ada beberapa yang disarankan oleh Tim Penilai APIP yaitu :

1. Perencanaan Kinerja

- a. Melakukan penetapan target kinerja baik ditingkat eselon III dan IV dengan berdasarkan pada basis data yang memadai, formulasi atas target yang ditetapkan, evaluasi dan tindak lanjut dalam Laporan Kinerja tahun sebelumnya yang telah dicapai
- b. Melakukan monitoring pencapaian target kinerja jangka menengah sampai dengan tahun berjalan dalam Renstra dengan indicator sebagai berikut :
 - Terdapat breakdown target kinerja jangka menengah kedalam target tahunan dan periodic yang selaras dan terukur
 - Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan danyang memonitor kinerja secara periodic
 - Terdapat jadwal, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme monitoring dokumen Renstra secara Periodik
 - Terdapat dokumentasi hasil monitoring/capaian kinerja jangka menengah yang dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja
 - Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring
- c. Melakukan reviu secara berkala terhadap Renstra dan indicator kinerja utama dengan menunjukkan kondisi yang lebih baik/disertai dengan adanya inovasi
- d. Melaksanakan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan sebelum penyusunan anggaran dan dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran
- e. Menjadikan target kinerja sebagai dasar untuk memilih dan memilah yang berkinerja baik untuk diberikan reward dan yang kurang (tidak) berkinerja baik untuk diberikan punishment

- f. Memonitor rencana aksi atas kinerja secara berkala dengan melakukan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja
- g. Memanfaatkan rencana aksi dengan menjadikan :
 - Target dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk memulai pelaksanaan setiap kegiatan
 - Target kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan
 - Target kinerja dalam rencana aksi sebagai dasar (acuan) untuk pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Melakukan pengukuran kinerja mulai pimpinan s.d staf dengan disertai bukti pendukung yang memadai
- b. Dalam melakukan pengukuran kinerja, agar disertai dengan data yang andal dan menggunakan teknologi informasi
- c. Menjadikan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur dan penilaian kinerja atas pencapaian sasaran utama dalam dokumen Rencana Kinerja Jangka Menengah, Rencana Kerja Tahunan, Penganggaran, Perjanjian Kinerja dan hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA)
- d. Atas hasil monitoring capaian kinerja dan pengukuran capaian kinerja eselon II,III, dan IV agar tidak hanya dimanfaatkan sebagai dasar pemberian reward namun juga dijadikan dasar pemberian punishment
- e. Agar memanfaatkan pengukuran kinerja untuk mengambil Tindakan dalam rangkamencapai target kinerja yang ditetapkan serta menjadi dasar untuk menyimpulkan sebagai kemajuan kinerja

2. Pelaporan Kinerja

- a. Melengkapai informasi dalam LKjIP OPD dengan upaya efesiensi penggunaan sumber daya yang telah dilakaukan, data capaian

kinerja tahun sebelumnya untuk dibandingkan dengan tahun penilaian

- b. Menyajikan informasi pada Laporan Kinerja yang didasarkan atas data yang dapat diandalkan
- c. Menyempurnakan Laporan Kinerja bukan hanya sebagai pemenuhan dokumen semata tetapi memanfaatkan informasinya secara maksimal dalam perbaikan perencanaan, penilaian kinerja, dan perbaikan program dan kegiatan serta peningkatan kinerja untuk periode selanjutnya.

3. Evaluasi Internal

- a. Menyusun evaluasi program dalam rangka menilai suatu program dilengkapi dengan kesimpulan yang menyatakan keberhasilan atau kegagalan serta rekomendasi dan tindak lanjut yang telah atau akan ditindaklanjuti
- b. Menyusun evaluasi program dengan melengkapi informasi terkait pengendalian kinerja dan perbaikan setiap periode setelah dilaksanakannya evaluasi
- c. Menyusun rencana aksi dengan menyajikan penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang diberikan serta menunjukkan perbaikan seitan periode serta rekomendasi dan tindak lanjut yang telah atau akan ditindaklanjuti.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA DAN STRATEGI

Rencana Strategis Kecamatan Tembelang adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Tembelang. Rencana Strategis Kecamatan Tembelang yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 ditetapkan dengan Peraturan Camat Tembelang Kabupaten Jombang Nomor 188/33/415.60/2021 tentang Penetapan Review Rencana Strategis Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023.

Renstra Kecamatan Tembelang tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kecamatan Tembelang. Penyusunan Renstra Kecamatan Tembelang telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kecamatan Tembelang dengan melibatkan *stakeholder* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), RPJMD, dan Forum SKPD.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Tembelang tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tembelang yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Tembelang dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

A.1. Visi dan Misi Kabupaten Jombang

1. Visi adalah pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana Instansi Pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inisiatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh Instansi Pemerintah. Berdasarkan dokumen RPJMD Tahun 2018-2023, maka Visi Kabupaten Jombang adalah:

“Bersama Mewujudkan Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing”

2. Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan kewenangan membantu Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangan yang telah dilimpahkan dalam memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan serta bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah, maka pelayanan prima dalam penyelenggaraan pemerintahan mempunyai keunggulan dalam memenuhi ketersediaan, ketepatan, kelayakan, dan kenyamanan dalam menyelenggarakan pelayanan bagi masyarakat.
3. Pembangunan melalui pelayanan yang prima akan mewujudkan terbentuknya sarana dan prasarana, stabilitas perekonomian, dan pengembangan potensi wilayah yang kemudian akan menciptakan kemandirian bagi masyarakat sehingga terwujud kesejahteraan dalam lingkungan masyarakat.
4. Pemberdayaan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengekspresikan kreativitas dan mendorong timbulnya dedikasi berdasarkan prinsip nilai yang mengandung penghargaan bagi masyarakat, sehingga masyarakat merasa dihargai dan diberi kesempatan mengekspresikan diri yang kemudian menimbulkan rasa kesejahteraan bagi masyarakat tersebut.
5. Untuk mencapai visi tersebut, Kecamatan Tembelang melaksanakan misi ke 1 (satu) dari Pemerintah Kabupaten Jombang yaitu **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional”** dengan indikator
 1. .Indeks Reformasi Birokrasi
 2. Indeks Kualitas Pelayanan Publik

A.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran tiap misi merupakan uraian lebih rinci atau lebih operasional untuk memahami dan mencapai misi, adapun tujuan dan sasaran dari misi **“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional”** adalah :

1. Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional memiliki sasaran:

- A. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
- B. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

Sedangkan indikatornya :

- b. Indeks Reformasi Birokrasi
- c. Indeks Kualitas Pelayanan Publik (IKPP)

B. Strategi dan Kebijakan

Kecamatan Tembelang sebagai satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan perkembangan organisasinya dipengaruhi oleh lingkungan yang strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis dimaksud adalah berupa lingkungan internal organisasi yang terdiri atas dua faktor strategi yaitu kekuatan dan kelemahan serta Lingkungan Eksternal organisasi yang terdiri dari dua faktor *strategi* yaitu tantangan dan peluang yang diperoleh melalui pendekatan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Treaths*).

Strategi mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi unit kerja yang berisi rencana secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya-upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Kebijakan Kecamatan Tembelang tidak bisa berdiri sendiri dan terlepas dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Jombang, maka kebijakan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tembelang adalah : Meningkatkan Pelayanan di Bidang Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Keamanan, Ketertiban, Pelayanan Umum serta pembinaan dan fasilitasi Pemerintah Desa.

Berikut analisis SWOTnya :

1. Peluang

- a. Undang-Undang mengenai Kecamatan yang menyatakan bahwa perlunya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati guna menunjang pelayanan prima.

- b. Masyarakat aktif terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dalam musrenbang Kecamatan.
- c. Peluang kerjasama yang besar dengan pemerintah Desa dalam rangka mengembangkan potensi Kecamatan.
- d. Peluang penataan dan pengembangan kawasan industri manufaktur non polutan yang sesuai dengan arah RT/RW.

2. Ancaman

- a. Tumpang tindihnya Tupoksi Kecamatan dengan SKPD teknis lainnya bilamana terjadi sebagian pelimpahan kewenangan Bupati Kepada Camat.
- b. Masyarakat banyak yang apatis untuk terlibat dalam proses perencanaan pembangunan yang dibahas dalam musrenbang Kecamatan.
- c. Wujud kerjasama Kecamatan dengan Pemerintah Desa seringkali mengalami kesulitan dalam hal koordinasi antar Pemerintah Desa dalam satu Kecamatan.
- d. Ancaman masalah pengembangan kawasan industri non polutan terhadap lokasi yang strategis sesuai dengan kebutuhan investor dan kekhawatiran adanya alih fungsi lahan produktif.

3. Kekuatan

- a. Adanya kewenangan yang sangat strategis dalam bidang koordinasi dan fasilitasi pembangunan antar Desa dalam satu Kecamatan.
- b. SDM secara kapasitas terbilang cukup mumpuni dalam hal pemberian pelayanan maupun dalam menjalankan administrasi pemerintahan umum.
- c. Tersedianya lahan yang dapat digunakan untuk menunjang arah perencanaan pembangunan kawasan industri non polutan.
- d. Adanya alokasi anggaran yang tersedia bagi Kecamatan dalam menjalankan tupoksinya.

4. Kelemahan

- a. Terbatasnya kewenangan Kecamatan dalam menjalankan pelayanan perijinan dan non-perijinan yang selama ini masih dilaksanakan oleh SKPD teknis yang bersangkutan.
- b. Belum meratanya tingkat kopetensi SDM dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat strategis.

- c. Sudah tidak memadainya beberapa sarana pendukung kantor dalam menunjang kelancaran fungsi organisasi.
- d. Alokasi anggaran Kecamatan yang terbatas dirasa kurang menunjang perencanaan pembangunan Kecamatan kedepan.
- e. Infrastruktur Kecamatan yang masih perlu peningkatan guna menarik investor dan percepatan pembangunan ekonomi masyarakat.

Adapun strategi Kecamatan Tembelang untuk mewujudkan Visi dan Misi Kecamatan Tembelang yaitu :

1. Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
3. Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
5. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Meningkatnya capaian kinerja aparatur

Kebijakan adalah arah/tindakan/cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Kebijakan – kebijakan Kecamatan Tembelang yaitu :

1. Melaksanakan Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
2. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.
3. Melaksanakan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
4. Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.
5. Melaksanakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
6. Melaksanakan capaian kinerja aparatur.

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja berkaitan dengan pelaporan kinerja dan tata cara reuiu instansi pemerintah yang termuat dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati/Walikota sebagai pemberi amanah

kepada Pimpinan SKPD sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Bupati Jombang dan Camat Tembelang atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersagkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud pada kegiatan tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tembelang Tahun 2021 mengacu pada dokumen Perubahan Renstra Kecamatan Tembelang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2021 serta perubahannya.

Tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah: sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Tembelang untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- a. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- b. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.1
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TEMBELANG TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Meningkatnya Akuntabilitasnya dan Kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Tembelang	BB (70,01)
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan	IKM Kecamatan Tembelang	86,80
		IPP Kecamatan Tembelang	3,4
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%
		Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	100%
		Persentase evaluasi RAPERDES APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu	100%

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	79	23,83%	48,08%	73,00%	100%	33.425.000
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	12,50%	50%	62,50%	100%	4.025.000
			Persentase Rekomendasi hasil pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	25%	50%	75%	100%	
3,	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	23,96%	47,92%	73,54%	100%	13.152.100
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	62,50%	75%	87,50%	100%	32.061.000
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha	30 lembaga	22,50%	50%	72,50%	100%	

			Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif						
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	0%	6,67%	100%	100%	18.997.300
6.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	41,61%	66,18%	82,72%	100%	3.163.873.775
Jumlah									3.265.534.175

D. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Kecamatan Tembelang dengan Pemerintah, ditetapkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Kinerja Utama	Indikator kinerja utama	Rumus penghitungan/formula	Sumber Data	PenanggungJawab
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi AKIP tahun n	Hasil Evaluasi SAKIP Kec. Tembelang	CAMAT TEMBELANG
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Tembelang	IKM Kecamatan Tembelang tahun n	Hasil Survey IKMKec. Tembelang	CAMAT TEMBELANG
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan Tembelang	IPP Kecamatan Tembelang tahun n	Hasil Survey IPPKec. Tembelang	CAMAT TEMBELANG
		Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	<p>Jumlah laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yangtindaklanjuti PD/ instansi terkait</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah laporan pelanggaran perda dan trantibum yang dikoordinasikan ke instansi terkait</p>	Laporan Pelanggaran Perda dan Trantibum	CAMAT TEMBELANG
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	<p>Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu</p> <p>----- x 100 %</p> <p>Jumlah laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa</p>	Laporan Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) Desa tahunan	CAMAT TEMBELANG

		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa tepat waktu ----- x 100 % Jumlah laporan Raperdes APB Desa dan Perubahan APB Desa	Laporan Evaluasi Raperdes APB Desa dan	CAMAT TEMBELANG
--	--	--	---	--	--------------------

Untuk menunjang tercapainya Indikator Tujuan Utama (IKU) Kecamatan Tembelang telah dirumuskan Indikator Program, Indikator Kegiatan dan Indikator Sub Kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.3
Program, Sasaran Program, Indikator Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan, Sasaran Sub Kegiatan, Indikator Sub Kegiatan
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	FORMULASI
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	Jumlah capaian kinerja seluruh pns di opd -----x100 Jumlah pegawai
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan -----x100 Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun tahun n
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun tahun n
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	Realisasi pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu -----x100 Anggaran gaji dan tunjangan ASN yang ditargetkan

			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	Jumlah laporan keuangan yang tersusun sesuai aturanx100 Jumlah Laporan keuangan yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Tembelang yang difasilitasi	14 bulan	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN lingkup Kec. Tembelang yang difasilitasi tahun n
	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD tahun n
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	Jumlah pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran -----x100 Pelayanan administrasi perkantoran yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	3 jenis	Jumlah komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi tahun n
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	55 jenis	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi tahun n
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	26 orang	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi tahun n
	4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	1. Jumlah pemenuhan barang cetak	8 buku	Jumlah pemenuhan barang cetak tahun n
			2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan	2000 lembar	Jumlah pemenuhan barang penggandaan tahun n
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	Jumlah pemenuhan bahan bacaan tahun n

	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasidan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD tahun n
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	Jumlah realisasi pengadaan sarana dan prasarana -----x100 Pengadaan sarana dan prasana yang ditargetkan
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya tahun n
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	4 unit	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor tahun n
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah -----x100 Jumlah pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang ditargetkan
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi tahun n
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	5 jenis	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan umum tahun n
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	Jumlah Barang Milik Daerah dalam kondisi baik -----x100 Jumlah Barang Milik Daerah yang di pelihara

	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara tahun n
			2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	11 unit	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dibayarkan pajaknya tahun n
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Tembelang yang dipelihara	1 gedung	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Tembelang yang dipelihara tahun n
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	11 unit	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Tembelang yang dipelihara tahun n
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	79	Nilai PATEN Kecamatan Tembelang Tahun n
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar -----x100% Jumlah Pelayanan terpadu (PATEN)
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Admindak yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan pelayanan admindak yang diverifikasi -----x100% Jumlah pengajuan Admindak
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	Jumlah pengajuan perizinan yang diverifikasi -----x100% Jumlah pengajuan perizinan

	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	Jumlah pelaksanaan PHBN/PHBA -----x100% Jumlah PHBN/PHBA yang direncanakan
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA tahun n
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 kegiatan	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan tahun n
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait -----x100% Jumlah laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum n
	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan tahun n

	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	Jumlah Desa yang melaporkan pertanggungjawaban Realisasi APBDes -----x100% Jumlah Desa
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti -----x100% Jumlah Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	30 dokumen	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	30 laporan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa tahun n
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa yang dievaluasi -----x100% Jumlah Raperdes APBDesa dan Perubahan APB Desa
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	30 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif tahun n
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	30 dokumen	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu tahun n
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	30 lembaga	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina tahun n

	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	30 dokumen	Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa tahun n
			2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	15 BUMDes	Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan tahun n
			3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	15 TP-PKK	Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan tahun n

E. RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan serta merupakan wacana proses yang akan memberikan prespektif mengenai apa yang menjadi tujuan instansi tersebut, Rencana Kinerja Tahunan yang dilakukan oleh Instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan Instansi yang tidak sesuai dengan rencana atau tujuan.

Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang merupakan Rencana Kerja yang disusun secara periodik setiap tahun merupakan uraian lebih lanjut dari Sasaran strategis. Indikator Kinerja dan Target Tahunan sebagaimana diketahui merupakan rencana lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut kedalam rencana tahunan agar program dan kegiatan lebih terarah.

Pengukuran kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau dihasilkan oleh organisasi Pemerintah dalam hal ini Kecamatan Tembelang melaporkan beberapa pelayanan yang berhubungan dengan masyarakat antara lain Sasaran, Strategis, Indikator Kinerja dan target Tahun 2021 :

Tabel 2.2.
Program/ Kegiatan dan Anggaran Kecamatan Tembelang
Tahun 2021

PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.163.873.775
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.359.000
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan di Tingkat Daerah	7.084.000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	3.275.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.629.675.675
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.629.075.675
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.541.820
Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.926.620
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	16.968.100
Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor	81.075.000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.876.100
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000

PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.296.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.322.000
Sub Kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	200.000.000
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	33.322.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.130.080
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.900.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.230.080
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.845.200
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.395.200
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-
Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	7.450.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	33.425.000
Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	33.425.000
Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.425.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32.061.000
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.061.000
Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32.061.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.152.100
Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13.152.100
Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13.152.100
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	18.997.300
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.997.300
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18.997.300
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.025.000
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.025.000
Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.025.000

Jumlah anggaran : Rp. 3.265.534.175,- (setelah PAK)

F. TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI

Tindak lanjut hasil evaluasi merupakan salah satu sarana introspeksi dan koneksi dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan capaian kualitas implementasi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setelah berakhirnya tahun anggaran 2021 masih ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam implementasi akuntabilitas kinerja. Meskipun dari hasil pelaporan dan analisis indikator sudah menunjukkan tingkat kemajuan, namun proses akuntabilitas kinerja masih lemah dan SAKIP belum diimplementasikan secara nyata dan konsisten.

Kurangnya komitmen dalam mengedepankan akuntabilitas dari sisi kinerja, sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat perhatian besar dan mengakibatkan terlambatnya proses penyusunan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan akuntabilitas kinerja pada tahun berjalan.

Terbitnya Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, diharapkan Sistem Manajemen Kinerja dapat berjalan lebih optimal lagi. Sehingga perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut dan system informasi kinerja mampu mencerminkan target, capaian, hasil dan manfaat sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Keterbatasan kapasitas SDM di bidang akuntabilitas kinerja menjadi salah satu penyebab lambatnya proses akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Sehingga evaluasi yang dilakukan secara berkala diharapkan dapat meningkatkan perbaikan akuntabilitas secara terus menerus dan hasilnya akan lebih baik dan bermanfaat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Kecamatan Tembelang sebagai SKPD pengemban misi organisasi melaksanakan kewajiban pertanggungjawaban melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

KATEGORI	NILAI ANGKA	INTERPRETASI
AA	> 90 s/d 100	: Sangat Memuaskan
A	> 80 s/d 90	: Memuaskan
BB	> 70 s/d 80	: Sangat Baik
B	> 60 s/d 70	: Baik
CC	> 50 s/d 60	: Cukup Baik
C	> 40 s/d 50	: Agak Kurang
D	0 s/d 40	: Kurang

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 0. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidaknya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Tembelang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator

kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Dokumen Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 serta Renja Perubahan 2021.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas kinerja Kecamatan Tembelang diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan strategi yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). Sehubungan hal tersebut, pada Tahun 2021, Kecamatan Tembelang memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Tembelang tahun 2021 diperoleh dari perbandingan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dengan realisasinya.

Selanjutnya dilaksanakan Evaluasi untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang ditemui agar dalam pencapaian misi dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa mendatang. Selain hal tersebut, dalam evaluasi kinerja dilaksanakan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh input tertentu.

Di dalam evaluasi kinerja, perlu untuk menggunakan beberapa pembanding, meliputi:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tembelang Tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Tujuan : 1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Tabel.3.1

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PROSENTASE CAPAIAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Tembelang	BB (70,01)	BB (70,10)	100,12%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan	2. IKM Kecamatan	86,80	88,86	102,37%
	3. IPP Kecamatan	3,4	2,883	84,79%
	4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%

5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
6. Persentase Evaluasi RAPERDES APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian IKU			97,88%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diketahui bahwa capaian indikator IKU Kecamatan Tembelang Tahun 2021 telah berhasil dan melebihi target sebesar 97,88% dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 70,01 telah tercapai 70,10 dengan tingkat capaian 100,12% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/374/415.15/2021 tanggal 3 November 2021
2. IKM Kecamatan Tembelang ditargetkan 86,80 hanya tercapai 88,86 dengan tingkat capaian 102,37%. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2022 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
3. IPP Kecamatan Tembelang ditargetkan 3,4 telah tercapai 2,883 dengan tingkat capaian 84,79%.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat waktu untuk segera ditindaklanjuti.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Tembelang telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA semester 1 beserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 30 dokumen
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Tembelang telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 30 dokumen.

Pencapaian kinerja tersebut dilandasi semangat sesuai pada pasal 67 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas kepastian hukum, tertib penyelenggara

negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas dan keadilan.

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut diatas diperoleh data dan informasi, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pencapaian Kinerja Sasaran
Kecamatan Tembelang Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1.	Melebihi/melampaui target	-
2.	Sesuai target	-
3.	Tidak mencapai target	97,88%

Selanjutnya sebagai pendukung keberhasilan capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tembelang Tahun 2021 berikut disajikan capaian kinerja masing-masing kegiatan dengan indikator yang telah ditetapkan, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Pengukuran Kinerja Tahun 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
	Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100,12%
	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	3 dokumen	100%
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	5 dokumen	100%
	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100%	100%
			2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Tembelang yang difasilitasi	14 bulan	14 bulan	100%

	3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%
	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Tersedianya komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	3 jenis	3 jenis	100%
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	55 jenis	55 jenis	100%
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	26 orang	26 orang	100%
	4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1. Jumlah pemenuhan barang cetak	8 buku	8 buku	100%
			2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan	2000 lembar	2000 lembar	100%
	5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	1 jenis	100%
	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	100%
	Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	1 paket	100%

	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	4 unit	4 unit	100%
	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	12 bulan	100%
	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa umum pelayanan kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	5 jenis	5 jenis	100%
	Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit	2 unit	100%
			2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	11 unit	11 unit	100%
	2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Tembelang yang dipelihara	1 gedung	1 gedung	100%
	3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	11 unit	11 unit	100%

		Bangunan Lainnya				
	Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai Paten Kecamatan	79	78,43	99,27%
	Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100%	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	100%	100%
			Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	100%	100%
	Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%
	Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	1 laporan	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi Dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 kegiatan	1 kegiatan	100%
	Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Koordinasi Ketentramandan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%
	Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	12 laporan	100%

	Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/ atau Kepolisian Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	12 kegiatan	100%
	Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%
			Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
	Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	30 dokumen	30 dokumen	100%
	Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	30 laporan	30 laporan	100%
	Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%
			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	30 lembaga	30 lembaga	100%
	Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	30 dokumen	30 dokumen	100%

			2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	30 lembaga	30 lembaga	100%
	Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	30 dokumen	30 dokumen	100%
			2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	15 BUMDes	15 BUMDes	100%
			3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	15 TP-PKK	15 TP-PKK	100%

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi		
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1.Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Tembelang	BB (70,01)	B (60,11)	B (61,59)	BB (70,10)
2.Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan	2. IKM Kecamatan	86,80	N/A	85,80	88,86
	3. IPP Kecamatan	3,4	N/A	3,38	2,883
	4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	N/A	N/A	100%
	5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	N/A	N/A	100%
	6.Persentase Evaluasi RAPERDES APBDesa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	N/A	N/A	100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja dari tahun 2019-2021 sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan kinerja. Pada 2019-2020 meningkat 1,48, sedangkan 2020-2021 meningkat signifikan 8,51
2. IKM Kecamatan Tembelang dari tahun 2020-2021 mengalami peningkatan 3,06
3. IPP Kecamatan Tembelang dari tahun 2020-2021 mengalami penurunan 0,496 dikarenakan ada beberapa unsur pendukung IPP yang perlu dilakukan perbaikan seperti tidak tersedianya inovasi, untuk 2022 akan dilakukan strategi perbaikan untuk mendorong peningkatan capaian nilai IPP.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2019-2020 belum dijadikan indikator sasaran strategis dan belum ada basic data yang akurat.
5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2019-2020 belum dijadikan

indikator sasaran strategis dan belum ada basic data yang akurat.

6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu belum dapat dibandingkan karena pada tahun 2019-2020 belum dijadikan indikator sasaran strategis dan belum ada basic data yang akurat.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1.Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Tembelang	72,01	70,10	97,34%
2.Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan	2. IKM Kecamatan	88,86	88,86	100%
	3. IPP Kecamatan	3,5	2,883	82,37
	4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%
	5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
	6.Persentase Evaluasi RAPERDES APBDesa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
	RATA-RATA TINGKAT KEMAJUAN			

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan realisasi kinerja terhadap target akhir periode renstra sebagai berikut:

1. Nilai Evaluasi AKIP telah mencapai tingkat kemajuan 97,34%, target periode akhir renstra 72,01 pada tahun 2021 telah tercapai 70,10.
2. IKM Kecamatan Tembelang telah mencapai tingkat kemajuan 100% target periode akhir renstra 88,86 pada tahun 2021 telah tercapai 88,86.
3. IPP Kecamatan Tembelang telah mencapai tingkat kemajuan 82,37% target periode akhir renstra 3,5 pada tahun 2021 telah tercapai 2,883.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode

renstra target tetap 100%.

5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%.
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu telah mencapai tingkat kemajuan sebesar 100% karena sampai akhir periode renstra target tetap 100%.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Pada tahun 2021 target sasaran strategis Kecamatan Tembelang dapat tercapai dengan rata – rata capaian kinerja 97,88% dengan kata lain kinerja kecamatan belum mencapai target yang telah ditetapkan. Akan tetapi pada tahun 2021 nilai IKM Kecamatan Tembelang sudah mencapai target yang ditetapkan karena terkait unsur penilaian IKM berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik unsur penilaian sarana dan prasarana dan kompetensi petugas perlu dilakukan perbaikan.

4.1 Faktor penunjang/penyebab keberhasilan pencapaian kinerja

- a. Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mengisyaratkan pentingnya kecamatan dalam pemerintahan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Implementasi kebijakan tersebut, telah mendorong terjadinya perubahan baik secara struktural fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yakni menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi.
- b. Dengan posisi kecamatan yang strategis, sejalan dengan terbitnya Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan) maka dapat diterapkan demi kelancaran pelayanan kepada masyarakat melalui dukungan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat.
- c. Dukungan dan komitmen Camat Tembelang, Kepala UPTD/B Se-Kecamatan, Kepala Desa serta stakeholder lain dalam mendukung pencapaian target pelaksanaan program pembangunan yang ada di wilayah Kecamatan Tembelang untuk mencapai tujuan organisasi.

4.2 Faktor Penghambat/Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja

- a. Kurangnya koordinasi dan sinkronisasi dalam implementasi

beberapa kebijakan/peraturan yang ada di masing-masing stakeholder.

- b. Masih adanya tumpang tindih peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- c. Kompetensi SDM aparatur yang kurang memadai.
- d. Implementasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat utamanya pada point pelayanan rekomendasi Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) kurang relevan disebabkan terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kecamatan, sedangkan pada pelayanan bidang non perijinan point Mencetak Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk juga kurang relevan disebabkan kewenangan mencetak/menerbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah pada Dispendukcapil Kab. Jombang, kecamatan hanya berhak memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- e. Kurangnya pemahaman stakeholder terhadap penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi.
- f. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pendukung pelayanan yang perlu dipenuhi seperti arena bermain anak, tempat parkir dll

4.3 Langkah-langkah yang diambil dalam pemecahan masalah

- a. Melaksanakan inventarisasi data yang akurat terkait kebijakan/peraturan perUndang-Undangan terkait Pemerintahan Daerah utamanya Kecamatan.
- b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi kepada seluruh stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan/peraturan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam implementasinya.
- c. Pengiriman aparatur Kecamatan dalam pelaksanaan diklat/bimbingan teknis/rakor/seminar dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
- d. Mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait dengan penerbitan regulasi adanya revisi beberapa point pada regulasi Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat yang kurang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- e. Melakukan evaluasi internal setiap akhir tribulan terkait tanggung jawab penerapan SAKIP dalam menjalankan tupoksi agar semua stakeholder memahami bahwasanya SAKIP adalah tanggung bersama.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Kecamatan Tembelang sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintah dituntut untuk terus meningkatkan kinerjanya terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui peningkatan pelayanan dari seluruh aspek kepada masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan yang ditetapkan dalam Dokumen Resntra 2014-2018 Kecamatan Tembelang yakni: Terwujudnya Pelayanan Prima Sesuai Kebutuhan dan Harapan Masyarakat, sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumberdaya berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Dalam pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja Kecamatan Tembelang melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan penggunaan sumberdaya maupun sumberdana.

Untuk analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia, secara umum Kecamatan Tembelang langsung memberi tanggungjawab kepada seksi yang berhubungan dengan target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut berusaha dengan mengedepankan prinsip:

a. **Transparan**

Membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi utamanya bidang pelayanan secara benar, dan tidak diskriminatif dengan tetap berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

b. **Responsif**

Dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi.

c. **Efisien**

Dalam pelaksanaan tugas mengarah kepada penggunaan sumberdaya yang dimiliki agar dapat memberikan hasil yang maksimal kepada publik.

d. **Efektif**

Merupakan kemampuan mencapai target berdasarkan sumberdaya yang ada dengan cara atau proses yang paling optimal.

e. **Akuntabel**

Bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

f. **Terukur**

Yakni penetapan target kinerja yang akan dicapai berikut cara untuk

mencapainya.

Selanjutnya analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana (anggaran), Kecamatan Tembelang melaksanakan setiap kinerjanya dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip efektif dan efisien. Prinsip efektif terlihat dari pencapaian target kinerja (output dan outcome) yang tercapai sesuai target. Prinsip efisien terlihat dari adanya penghematan serta penyesuaian anggaran pada beberapa kinerja yang dilakukan tanpa mengurangi output atau outcome yang dihasilkan. Selengkapnya tersaji dalam tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja kecamatan	1. Nilai Evaluasi AKIP Kec. Tembelang	100,12%	98,48%	1,64%
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan	2. IKM Kecamatan	102,37%	88,20%	14,17%
		3. IPP Kecamatan	84,79%		
		4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%		
		5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%		
		6. Persentase Evaluasi RAPERDES APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%		

6. Analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Analisis kinerja didasarkan pada hasil pengukuran kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam suatu sasaran strategis yang diharapkan. Sasaran strategis yang telah ditetapkan tidak dapat dicapai jika tidak didukung dengan program dan kegiatan yang benar-benar mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan yakni

1. Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi
2. Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Kecamatan Tembelang menetapkan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai berikut:

Tabel 3.7
Program, Kegiatan, Anggaran, Outcome/Output Yang Dihasilkan

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100	3.144.707.076	98,48%	Sangat menunjang
Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang tersusun sesuai aturan	100%	100	10.359.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	3 dokumen	100	7.084.000	100	Sangat menunjang
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	5 dokumen	100	3.275.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Persentase pencairan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	100	2.168.380.675	99,57	Sangat menunjang
	2. Persentase laporan keuangan yang tersusun sesuai aturan	100%	100			Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN lingkup Kecamatan Tembelang yang difasilitasi	14 bulan	100	2.617.780.675	99,57	Sangat menunjang
3. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan tahunan SKPD	1 dokumen	100	600.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100	104.637.320	97,30	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang terfasilitasi.	3 jenis	100	1.926.620	100	Sangat menunjang
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi	55 jenis	100	16.968.100	100	Sangat menunjang
3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan makanan dan minuman pegawai yang terfasilitasi	22 orang	100	79.105.000	97,57	Sangat menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1. Jumlah pemenuhan barang cetak	8 buku	100	2.874.600	99,95	Sangat menunjang
	2. Jumlah pemenuhan barang penggandaan	2000 lembar	100			Sangat menunjang
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pemenuhan Bahan Bacaan	1 jenis	100	2.225.000	92,71	Sangat menunjang
6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	100	1.538.000	66,99	Sangat menunjang
Kegiatan: Pengadaan barang milik Daerah penunjang urusan pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan sarana dan prasarana aparatur	100%	100	233.322.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan : 1. Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	1 paket	100	200.000.000	100	Sangat menunjang
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan sarana gedung kantor	4 unit	100	33.322.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100	146.281.471	97,44	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang terfasilitasi	12 bulan	100	14.715.508	92,55	Sangat menunjang
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan jenis Pelayanan Umum	5 jenis	100	131.565.963	98,02	Sangat menunjang
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100	31.726.610	96,59	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	1. Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	2 unit	100	24.276.610	96,50	Sangat menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
	2. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dibayarkan pajaknya.	11 unit	100			Sangat menunjang
2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya PD Kec. Tembelang yang dipelihara	1 gedung	100	-	-	-
3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	11 unit	100	7.450.000	100	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	79	100	21.425.000	100	Sangat menunjang
Kegiatan : Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelayanan terpadu (PATEN) yang sesuai standar	100%	100	21.425.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pengajuan pelayanan Adminduk yang diverifikasi	100%	100	21.425.000	100	Sangat menunjang
	Persentase pengajuan perizinan yang diverifikasi	100%	100		100	Sangat menunjang
Program: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100	18.997.300	100	Sangat menunjang
Kegiatan: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan PHBN/PHBA	1 laporan	100	18.997.300	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah kegiatan PHBN/PHBA yang dilaksanakan	1 kegiatan	100	18.997.300	100	Sangat menunjang
Program: Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100	13.152.100	100	Sangat menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
Kegiatan: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum	12 laporan	100	13.152.100	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah kegiatan identifikasi kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dilaksanakan	12 kegiatan	100	13.152.100	100	Sangat menunjang
Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100	4.025.000	100	Sangat menunjang
	Persentase Rekomendasi Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	100			Sangat menunjang
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Rekomendasi hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	30 dokumen	100	4.025.000	100	Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa	30 laporan	100	4.025.000	100	Sangat menunjang
Program: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1. Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100	32.061.000	100	Sangat menunjang
	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	30 lembaga	100			Sangat menunjang
Kegiatan: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa yang tepat waktu	30 dokumen	100	32.061.000	100	Sangat menunjang

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran	% Capaian Anggaran	Menunjang/ Kurang
2	3	4	5			
	2. Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dibina	30 lembaga	100			Sangat menunjang
Sub Kegiatan: Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1. Jumlah Pengajuan Raperdes APB Desa /Perubahan APB Desa	30 dokumen	100	32.061.000	100	Sangat menunjang
	2. Jumlah BUMDesa yang dikoordinasikan	15 BUMDes	100			Sangat menunjang
	3. Jumlah TP PKK yang dikoordinasikan	15 TP-PKK	100			Sangat menunjang

B. Realisasi Anggaran

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Tembelang Tahun 2021, bahwa untuk mencapai sasaran ditetapkan 6 (enam) indikator kinerja yang dalam pelaksanaannya didukung oleh 6 Program , 11 kegiatan, dan 22 sub kegiatan

Guna mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut maka dibutuhkan anggaran yang merupakan input dari terlaksananya kegiatan dimaksud dan dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum pada dokumen Perjanjian Kinerja. Pada tahun 2021 ini Kecamatan Tembelang mendapatkan anggaran sebesar Rp. 3.265.534.175 dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 3.234.367.476 atau serapan dana APBD mencapai 99,04% sehingga dapat diketahui pada tahun 2021 kondisi anggaran silpa Rp. 31.166.699. Selanjutnya ditampilkan alokasi anggaran yang menunjang pencapaian sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 3.8
Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	3.163.873.775	96,88
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan	IKM Kecamatan Tembelang	52.422.300	1,60
		IPP Kecamatan Tembelang		
		Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait	13.152.100	0,41
		Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	4.025.000	0,12
		Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu	32.061.000	0,99
TOTAL			3.265.534.175	100

Selanjutnya secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Sasaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Tembelang	BB (70,01)	BB (70,10)	100,12%	3.163.873.775	3.144.707.076	98,48%
Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan	2. IKM Kecamatan	86,60	88,86	102,37%	33.425.000	21.425.000	64,10%
	3. IPP Kecamatan	3,4	2,883	84,79%	18.997.300	18.997.300	100%
	4. Persentase laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%	100%	100%	13.152.100	13.152.100	100%
	5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	4.025.000	4.025.000	100%
	6. Persentase Evaluasi RAPERDES APB Desa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%	32.061.000	32.061.000	100%
RATA –RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN				97,54%	3.265.534.175	3.234.367.476	99,04%

Berdasarkan table di atas dapat diketahui secara umum terdapat efektifitas anggaran terhadap capaian Sasaran Strategis guna mencapai tujuan perangkat daerah “Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi” dapat disimpulkan bahwa anggaran yang digunakan efektif terhadap capaian kinerja organisasi, yakni melalui penyerapan anggaran kinerja sebesar 99,04% telah menghasilkan kinerja sebesar 97,54% dari target sebesar 100% terjadi inefisiensi sebesar **-1,5%**

Secara rinci pencapaian kinerja dan anggaran Kecamatan Tembelang tersaji dalam tabel berikut ini:

TABEL 3.10
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN
KECAMATAN TEMBELANG TAHUN 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	3.163.873.775	3.144.707.076	98,48%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Paten Kecamatan	79	78,43	99,27%	33.425.000	21.425.000	64,10%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	100%	100%	4.025.000	4.025.000	100%
	Persentase Rekomendasi hasil pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APBDesa yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	100%	100%	32.061.000	32.061.000	100%
	Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	30 lembaga	30 lembaga	100%			

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	100%	100%	13.152.000	13.152.000	100%
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH UMUM	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	100%	100%	18.997.300	18.997.300	100%
RATA –RATA PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN				99,90%	3.265.534.175	3.234.367.476	99,04%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Nasional.

Tabel 3.11

Perbandingan Realisasi SAKIP, IPP dan IKM Kec. Tembelang dengan Skala Nasional

Uraian	Realisasi Kec Tembelang	Realisasi Nasional	% Perbandingan dg Nasional
Nilai SAKIP	70,10	75,65	92,66%
Nilai IPP	2,883	3,63	79,42%
Nilai IKM	88,86	88,19	100,71%

Sumber: - Paparan Ketua KSAN, Prof Agus Pramusinto dan Paparan Deputi bid. Reformasi

Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto

Berdasarkan Tabel diatas didapati Capaian Kinerja Kecamatan Tembelang tahun 2022 dibandingkan dengan Capaian kinerja tahun 2021 Standart Nasional niainya sudah mendekati dengan rincian pada tahun 2021 Nilai SAKIP Kecamatan 70,10 (BB) sedangkan nilai SAKIP Nasional 75,65 ada selisih kurang sekitar -5,55 Poin. Untuk capaian nilai IPP Kecamatan Tembelang Tahun 2021 2,47 sedangkan Nilai IPP rata rata nasional sebesar 3,63 dengan selisih kurang sebesar -0,747 poin. Sedangkan untuk Pencapaian Nilai IKM/SKM Kecamatan Tembelang tahun 2021 sebesar 91,92 sedangkan nilai SKM rata-rata Nasional sebesar 88,19 atau selisih hanya 0,67 poin.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Tembelang Tahun 2021 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Tembelang tahun 2018-2023, yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Tembelang.

Laporan kinerja Kecamatan Tembelang Tahun 2021 memaparkan keberhasilan serta analisa program/kegiatan yang menunjang maupun hambatan dalam proses pencapaian pelaksanaan sesuai dengan Penetapan Kinerja Tahun 2021. Capaian Kinerja tersebut dijabarkan dalam indikator kinerja yang diuraikan dari sasaran dan tujuan Kecamatan Tembelang. Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian kinerja, Kecamatan Tembelang mendapatkan alokasi dana APBD tahun 2021 Rp. 3.265.534.175,00 realisasi sebesar Rp 3.234.367.476,00 atau sebesar 99,04%.

TABEL 4.1
PENDANAAN INDIKATIF TAHUN 2021

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.163.873.775	3.144.707.076	98,48%
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.359.000	10.359.000	100%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan di Tingkat Daerah	7.084.000	7.084.000	100%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD	3.275.000	3.275.000	100%
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.629.675.675	2.618.380.675	99,57%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.629.075.675	2.617.780.675	99,57%
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	600.000	600.000	100%
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	107.541.820	104.637.320	97,30%
	Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.926.620	1.926.620	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	16.968.100	16.968.100	100%
	Sub Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor	81.075.000	79.105.000	97,57%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.876.100	2.874.600	99,95%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	2.225.000	92,71%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.296.000	1.538.000	66,99%
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.322.000	233.322.000	100%
	Sub Kegiatan Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya	200.000.000	200.000.000	100%

	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	33.322.000	33.322.000	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.130.080	146.281.471	97,44%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	15.900.000	14.715.508	92,55%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	134.230.080	131.565.963	98,02%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.845.200	31.726.610	96,59%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	25.395.200	24.276.610	95,60%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-		
	Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	7.450.000	7.450.000	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	33.425.000	21.425.000	100%
	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan	33.425.000	21.425.000	100%
	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	33.425.000	21.425.000	100%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	32.061.000	32.061.000	100%
	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	32.061.000	32.061.000	100%
	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	32.061.000	32.061.000	100%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.152.100	13.152.100	100%
	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	13.152.100	13.152.100	100%

	Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan / atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	13.152.100	13.152.100	100%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	18.997.300	18.997.300	100%
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	18.997.300	18.997.300	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	18.997.300	18.997.300	100%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	4.025.000	4.025.000	100%
	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	4.025.000	4.025.000	100%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	4.025.000	4.025.000	100%
	JUMLAH	3.265.534.175,-	3.234.367.476	99,04%

Selama Tahun 2021 melalui target pada Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai, peran Kecamatan terlihat melalui Sasaran Strategis yakni “Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan” dan “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan Kecamatan” dengan capaian kinerja sebesar 97,88%. Dengan pencapaian hasil IKU Kecamatan Tembelang pada Tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.2
Capaian Kinerja Kecamatan Tembelang tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1.	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Kecamatan Tembelang	1. Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Tembelang	BB (70,01)	BB (70,10)	100,12%
2.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan Tembelang	2. IKM Kecamatan Tembelang	86,80	88,86	102,37%
		3. IPP Kecamatan Tembelang	3,4	2,883	84,79%
		4. Persentase laporan pelanggaran Perda /Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti Instansi terkait	100%	100%	100%
		5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
		6. Persentase Evaluasi RAPERDES APBDesa/ Perubahan APB Desa tepat waktu	100%	100%	100%
RATA - RATA IKU					97,88%

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Nilai Evaluasi AKIP ditargetkan 70,01 telah tercapai 70,10 dengan tingkat capaian 100,12% berdasarkan hasil LHE SAKIP no. X.700/374/415.15/2021 tanggal 3 November 2021
2. IKM Kecamatan Tembelang ditargetkan 86,80 hanya tercapai 88,86 dengan tingkat capaian 102,37%. Untuk meningkatkan kinerja berdasarkan hasil IKM tahun 2022 akan dilakukan perbaikan pada unsur sarana dan prasarana dan kompetensi petugas berdasarkan Permenpanrb No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik.
3. IPP Kecamatan Tembelang ditargetkan 3,4 telah tercapai 2,883 dengan tingkat capaian 84,79%.
4. Persentase laporan pelanggaran Perda dan Trantibum yang ditindaklanjuti oleh perangkat daerah atau instansi terkait target 100% tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap kasus pelanggaran perda dan Trantibum yang membutuhkan tindak lanjut dilaporkan dan dikoordinasikan ke instansi tepat

waktu untuk segera ditindaklanjuti.

5. Persentase pertanggungjawaban realisasi APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap desa di Kecamatan Tembelang telah melaporkan realisasi APB Desa tepat waktu berupa LRA semester 1 beserta Perdesnya dan LRA akhir Tahun beserta perdesnya tepat waktu sebanyak 30 dokumen
6. Persentase evaluasi Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa tepat waktu ditargetkan 100% telah tercapai 100% dengan tingkat capaian 100%. Setiap Desa di Kecamatan Tembelang telah menyusun Raperdes dan Raperdes Perubahan tepat waktu sebanyak 30 dokumen.

Adapun tujuan dari Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati Jombang dan Camat Tembelang untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi terjadinya pergantian atau mutasi pejabat, dikarenakan:

- Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran)
- Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 4.3
PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN TEMBELANG TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kec. Tembelang	BB (70,01)
2	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan layanan kecamatan	IKM Kecamatan Tembelang	86,80
		IPP Kecamatan Tembelang	3,4
		Persentase laporan kasus pelanggaran Perda / Perkada dan Trantibum yang ditindaklanjuti instansi terkait	100%
		Persentase laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tepat waktu	100%
		Persentase evaluasi RAPERDES APBDesa /Perubahan APBDesa tepat waktu	100%

NO.	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET TAHUNAN	TARGET TRIWULAN				ANGGARAN
					I	II	III	IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Program Penyelenggaraan pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai Paten Kecamatan	79	23,83%	48,08%	73,00%	100%	33.425.000
2.	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang melaporkan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa	100%	12,50%	50%	62,50%	100%	4.025.000
			Persentase Rekomendasi hasil pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan APB Desa yang ditindaklanjuti	100%	25%	50%	75%	100%	
3.	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Laporan kasus pelanggaran Perda/Perkada dan Trantibum yang dikoordinasikan ke Instansi Terkait	100%	23,96%	47,92%	73,54%	100%	13.152.100
4.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Raperdes APB Desa/Perubahan APB Desa yang dievaluasi	100%	62,50%	75%	87,50%	100%	32.061.000
			Jumlah Lembaga/Badan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	30 lembaga	22,50%	50%	72,50%	100%	
5.	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase PHBN/PHBA yang dilaksanakan	100%	0%	6,67%	100%	100%	18.997.300
6.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	41,61%	66,18%	82,72%	100%	3.163.873.775
Jumlah									3.265.534.175

Beberapa langkah kedepan yang akan dilakukan oleh Kecamatan Tembelang untuk lebih meningkatkan kinerja adalah:

1. Mendorong upaya koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh seksi dan sub bagian dalam pencapaian kinerja.
2. Mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam seluruh lini untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
3. Mendorong pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja pelayanan dan pemerintahan

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam Perubahan Renstra Kecamatan Tembelang Tahun 2018-2023 yang juga tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Tembelang Tahun 2021 dapat dipenuhi sesuai harapan. Namun demikian peningkatan kinerja selalu menjadi pedoman demi mendukung pencapaian Visi Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tembelang diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Kecamatan Tembelang kepada pihak terkait sebagai stakeholders ataupun yang telah berperan aktif dan mengambil bagian dalam pelaksanaan seluruh program pembangunan.

Tembelang, Januari 2022



CAMAT TEMBELANG

AGUS SANTOSO, S.Sos
Pembina
NIP. 197303291992011001



PROBIS KECAMATAN

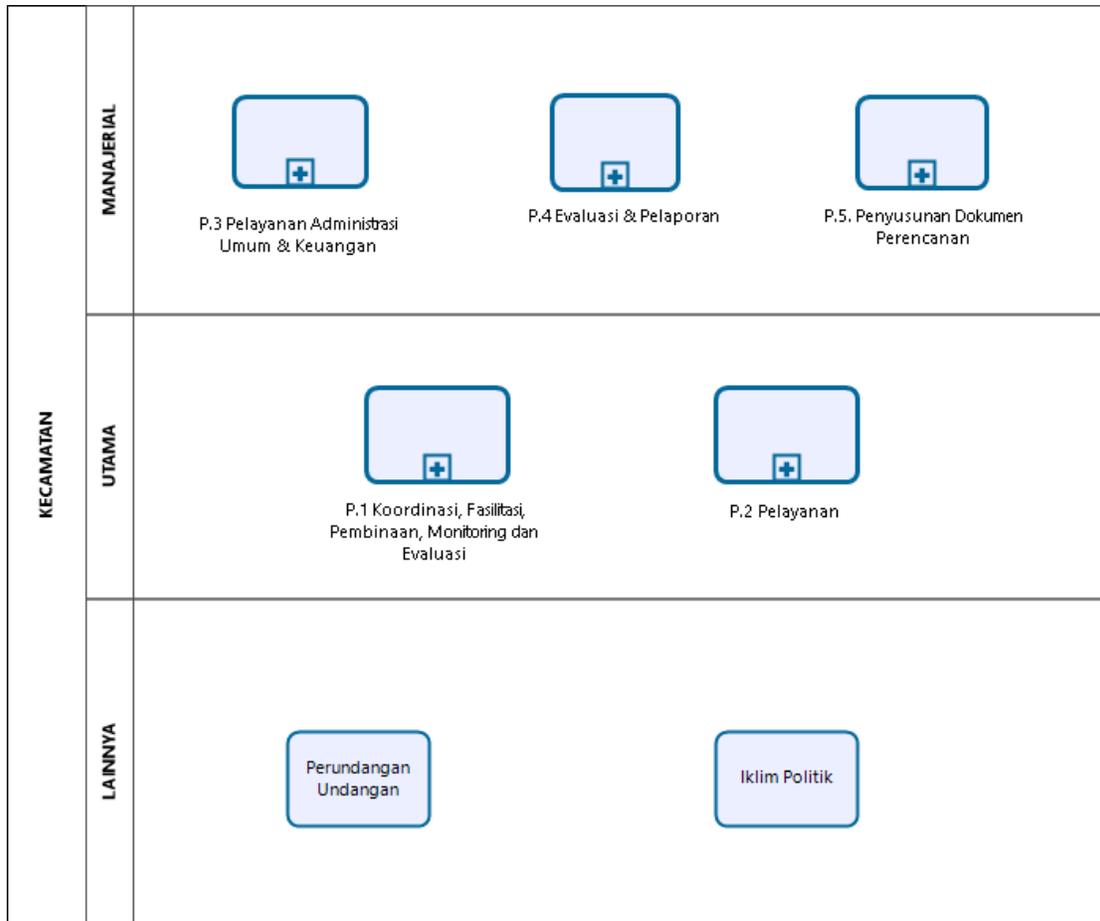
Bizagi Modeler

PROBIS KECAMATAN.....	1
BIZAGI MODELER.....	1
1 P.0 PROSES UTAMA KECAMATAN	5
1.1 KECAMATAN.....	5
1.1.1 Process Elements.....	5
2 P.1 KOORDINASI, FASILITASI, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI	6
2.1 MAIN PROCESS.....	6
2.1.1 Process Elements.....	6
3 P.1.1 KOORDINASI.....	7
3.1 P.1.1 KOORDINASI.....	7
3.1.1 Process Elements.....	7
4 P.1.1.1 KOORDINASI TOP-DOWN	8
4.1 P.1.1.1 KOORDINASI TOP-DOWN.....	8
4.1.1 Process Elements.....	8
5 P.1.1.2 KOORDINASI BOTTOM-UP	9
5.1 P.1.1.2 KOORDINASI BOTTOM-UP	9
5.1.1 Process Elements.....	9
6 P.1.2 FASILITASI.....	10
6.1 P.1.2 FASILITASI.....	10
6.1.1 Process Elements.....	10
7 P.1.3 PEMBINAAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
7.1 P.1.3 PEMBINAAN.....	11
7.1.1 Process Elements.....	11
8 P.1.4 MONITORING DAN EVALUASI.....	12
8.1 P.1.4 MONITORING DAN EVALUASI.....	12
8.1.1 Process Elements.....	12
9 P.2 PELAYANAN	13
9.1 MAIN PROCESS.....	13
9.1.1 Process Elements.....	13
10 P.2.1 PERIZINAN.....	14
10.1 P.2.1 PERIZINAN.....	14
10.1.1 Process Elements.....	14
11 P.2.2 NON-PERIZINAN	15
11.1 P.2.2 NON-PERIZINAN.....	15
11.1.1 Process Elements.....	15
12 P.3 PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN	16
12.1 P.3 PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN	16
12.1.1 Process Elements.....	16
13 P.3.1 PENGADMINISTRASIAN SURAT MASUK.....	17
13.1 P.3.1 PENGADMINISTRASIAN SURAT MASUK.....	17

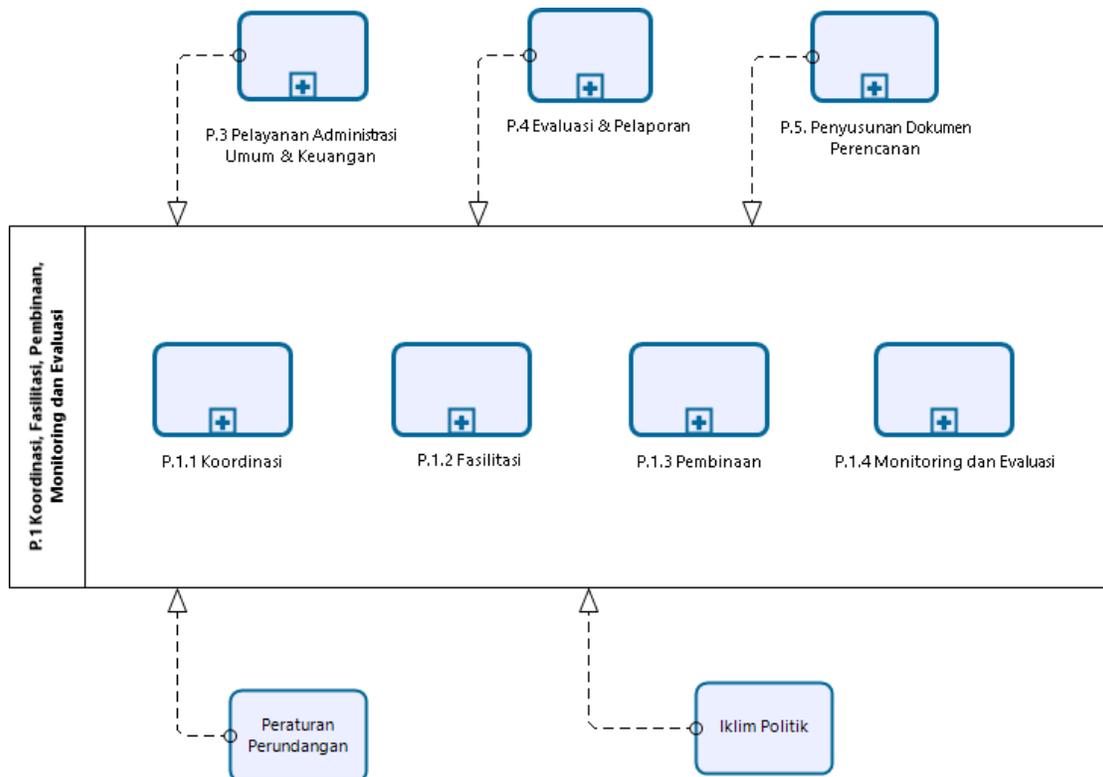
13.1.1	Process Elements.....	17
14	P.3.2 PENGADMINISTRASIAN SURAT KELUAR.....	18
14.1	P.3.2 PENGADMINISTRASIAN SURAT KELUAR.....	18
14.1.1	Process Elements.....	18
15	P.3.3 PENGADMINISTRASIAN KENAIKAN PANGKAT.....	19
15.1	P.3.3 PENGADMINISTRASIAN KENAIKAN PANGKAT.....	19
15.1.1	Process Elements.....	19
16	P.3.3 PENGADMINISTRASIAN PEMBERIAN CUTI.....	20
16.1	P.3.3 PENGADMINISTRASIAN PEMBERIAN CUTI.....	20
16.1.1	Process Elements.....	20
17	P.3.5 PENGADMINISTRASIAN PETANGGUNGJAWABAN KEUANGAN.....	21
17.1	P.3.5 PENGADMINISTRASIAN PETANGGUNGJAWABAN KEUANGAN.....	21
17.1.1	Process Elements.....	21
18	P.3.5.1 SPP-SPM-UP.....	22
18.1	P.3.5.1 SPP-SPM-UP.....	22
18.1.1	Process Elements.....	22
19	P.3.5.2 SPP-SPM-LSGUTU.....	23
19.1	P.3.5.2 SPP-SPM-LS/GU/TU.....	23
19.1.1	Process Elements.....	23
20	P.3.6 PEMELIHARAAN RUTIN SARANA PRASARANAKENDARAAN.....	24
20.1	P.3.6 PEMELIHARAAN RUTIN SARANA PRASARANA/KENDARAAN.....	24
20.1.1	Process Elements.....	24
21	P.3.7 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR.....	25
21.1	P.3.7 PEMELIHARAAN RUTINBERKALA GEDUNG KANTOR.....	25
21.1.1	Process Elements.....	25
22	P.3.8 LAYANAN BBM.....	26
22.1	P.3.8 LAYANAN BBM.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
22.1.1	Process Elements.....	Error! Bookmark not defined.
23	P.3.9 PENYUSUNAN SK TIM KECAMATAN.....	27
23.1	P.3.9 PENYUSUNAN SK TIM KECAMATAN.....	27
23.1.1	Process Elements.....	27
24	P.3.10 PELAYANAN ATK.....	28
24.1	P.3.10 PELAYANAN ATK.....	28
24.1.1	Process Elements.....	28
25	P.3.11 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR.....	29
25.1	P.3.11 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR.....	29
25.1.1	Process Elements.....	29
26	P.4 EVALUASI DAN PELAPORAN.....	30
26.1	P.4 EVALUASI DAN PELAPORAN.....	30
26.1.1	Process Elements.....	30
27	P.4.1 EVALUASI KINERJA.....	31

27.1	P.4.1 EVALUASI KINERJA.....	31
27.1.1	Process Elements.....	31
28	P.4.2 PELAPORAN KINERJA.....	32
28.1	P.4.2 PELAPORAN KINERJA.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
28.1.1	Process Elements.....	32
29	P.4.3 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	33
29.1	P.4.3 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.....	33
29.1.1	Process Elements.....	33
30	P.5 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN.....	34
30.1	P.5 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN.....	34
30.1.1	Process Elements.....	34
31	P.5.1 PENYUSUNAN RENSTRA.....	35
31.1	P.5.1 PENYUSUNAN RENSTRA.....	35
31.1.1	Process Elements.....	35
32	P.5.2 PENYUSUNAN RENJA.....	36
32.1	P.5.2 PENYUSUNAN RENJA.....	36
32.1.1	Process Elements.....	36
33	P.5.2.1 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA.....	37
33.1	P.5.2.1 PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RENJA.....	37
33.1.1	Process Elements.....	37
34	P.5.2.2 PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA.....	38
34.1	P.5.2.2 PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA.....	38
34.1.1	Process Elements.....	38
35	P.5.3 PENYUSUNAN RKA.....	39
35.1	P.5.3 PENYUSUNAN RKA.....	39
35.1.1	Process Elements.....	39
36	PETA RELASI.....	40
36.1	KECAMATAN.....	40
36.1.1	Process Elements.....	40

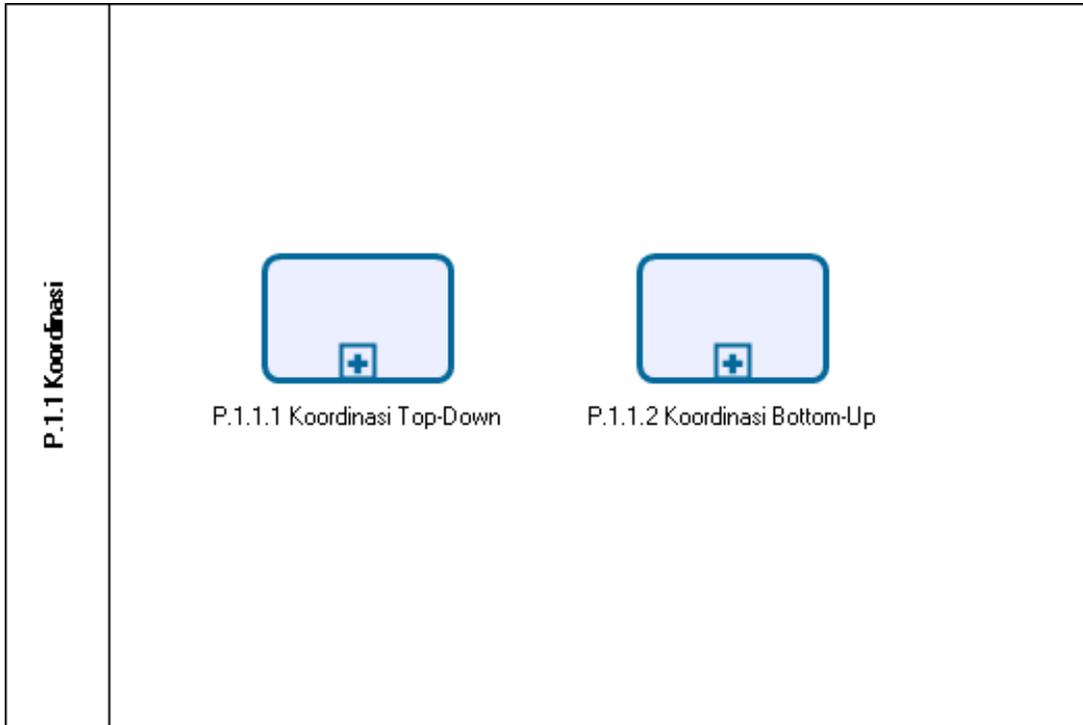
1 P.0 PROSES UTAMA KECAMATAN



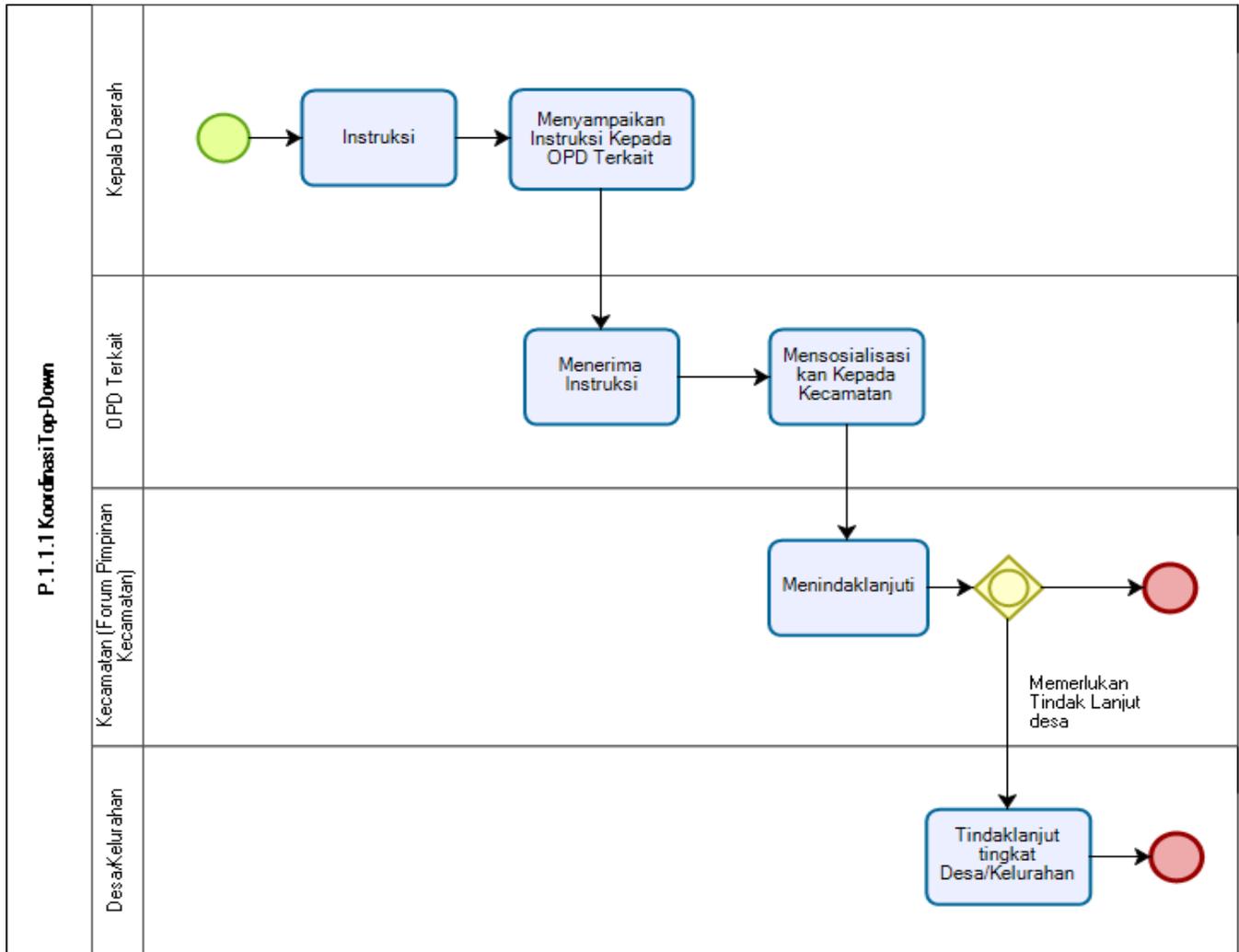
2 P.1 Koordinasi, Fasilitas, Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi



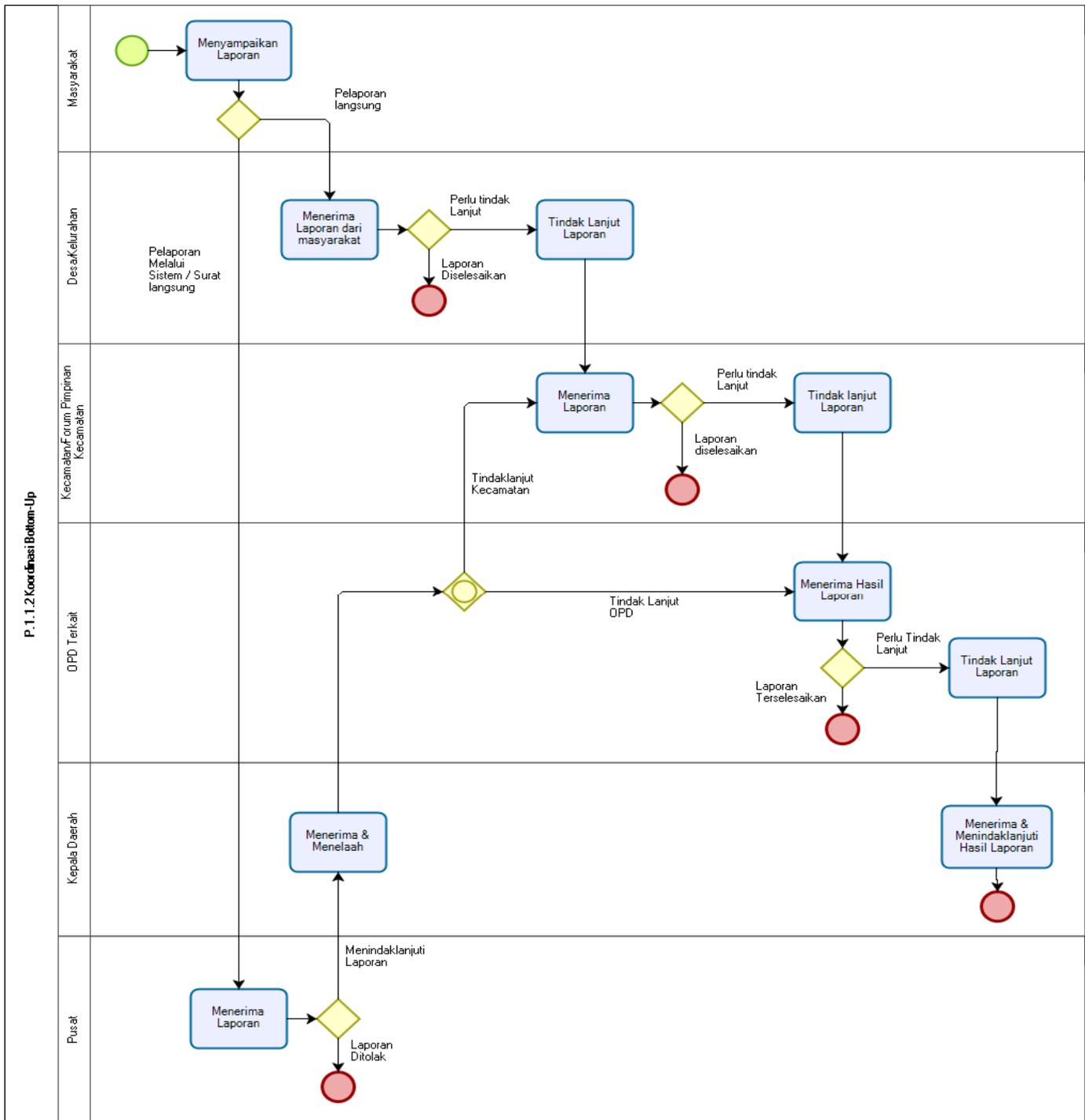
3 P.1.1 Koordinasi



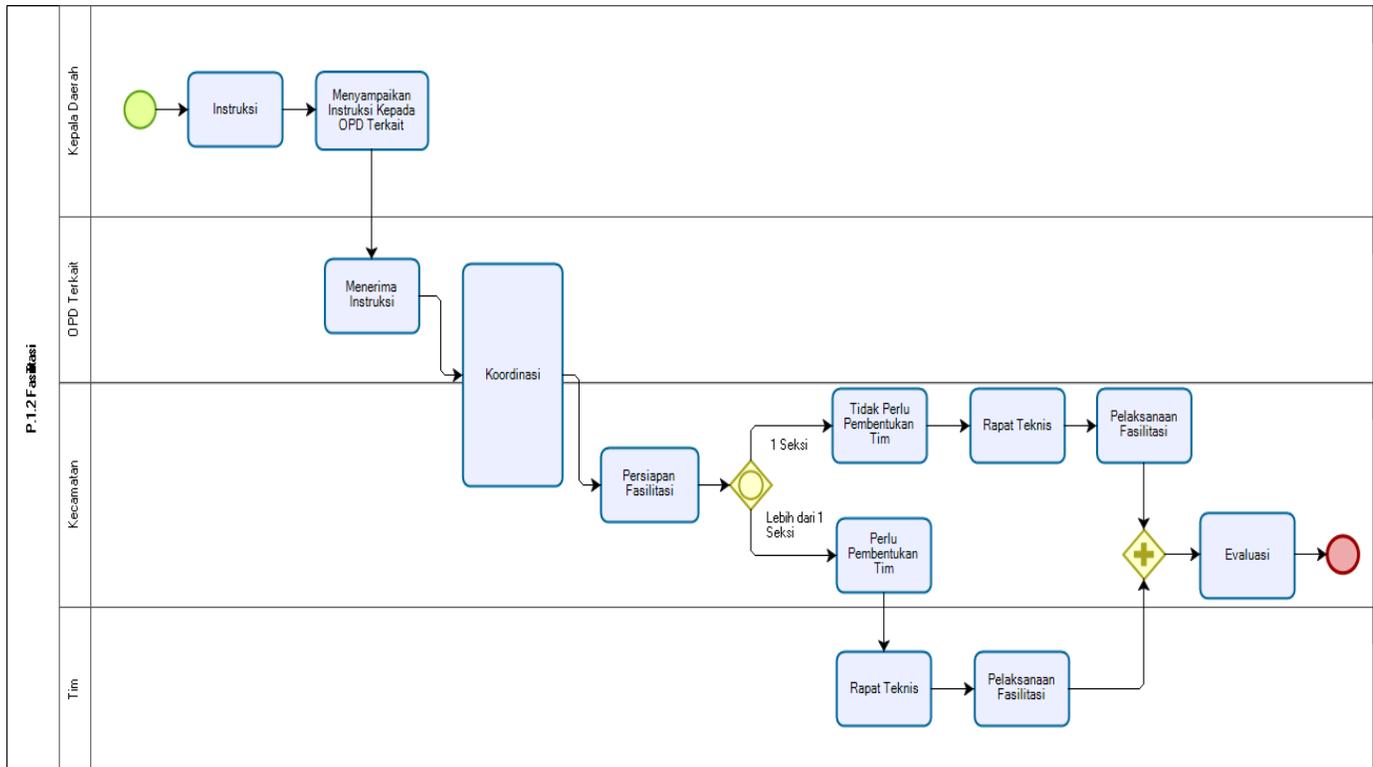
4 P.1.1.1 Koordinasi Top-Down



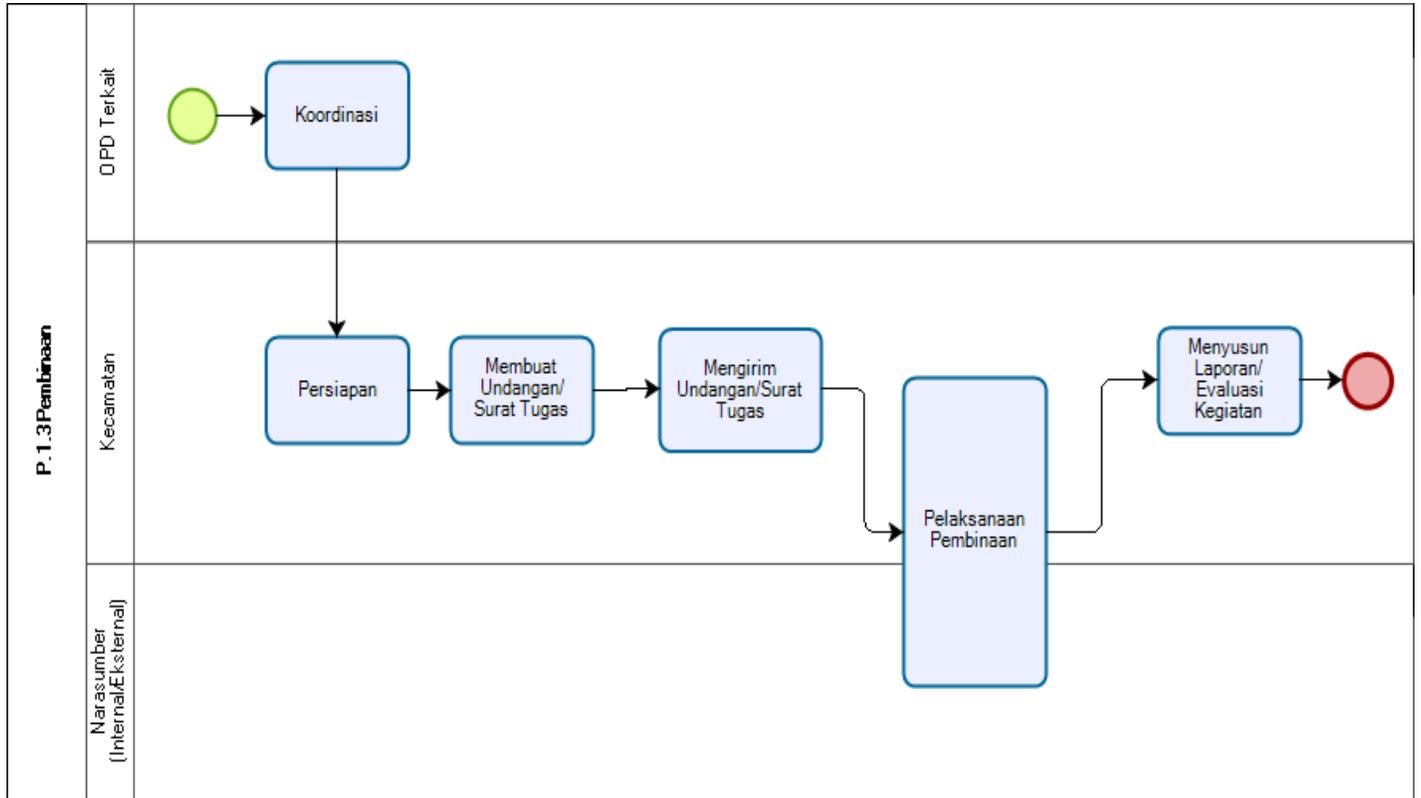
5 P.1.1.2 Koordinasi Bottom-Up



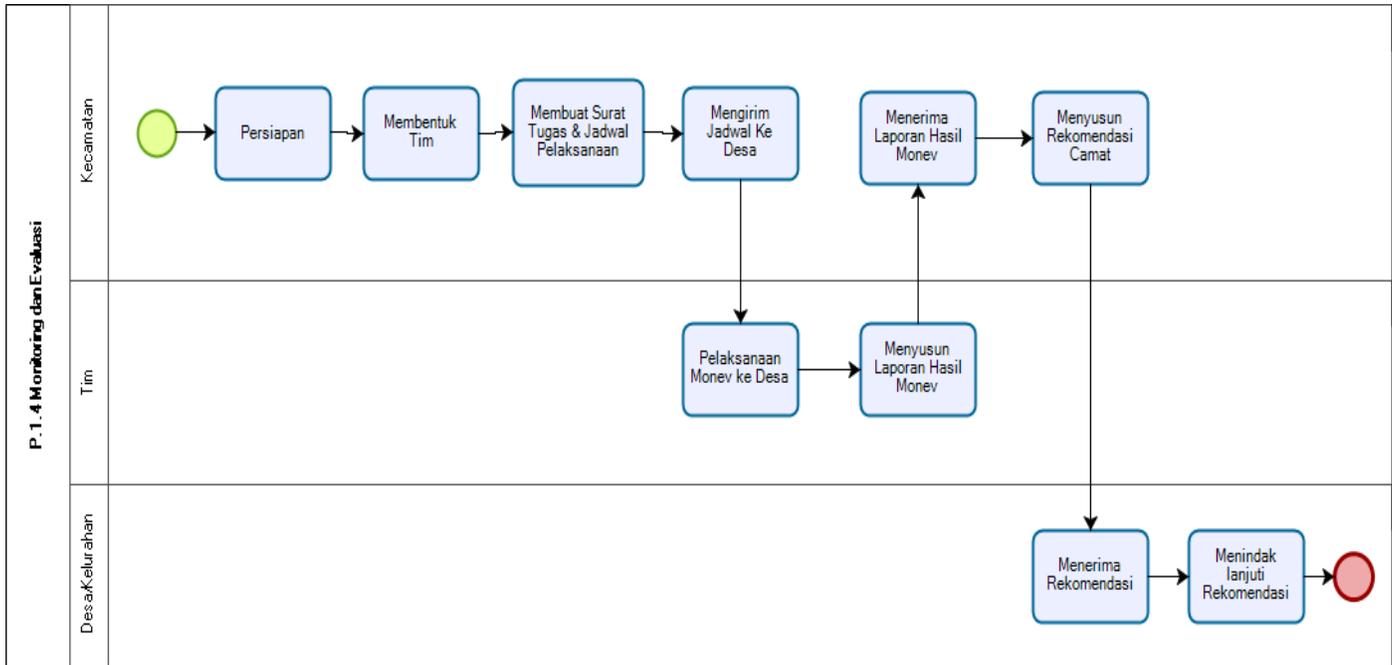
6 P.1.2 Fasilitas



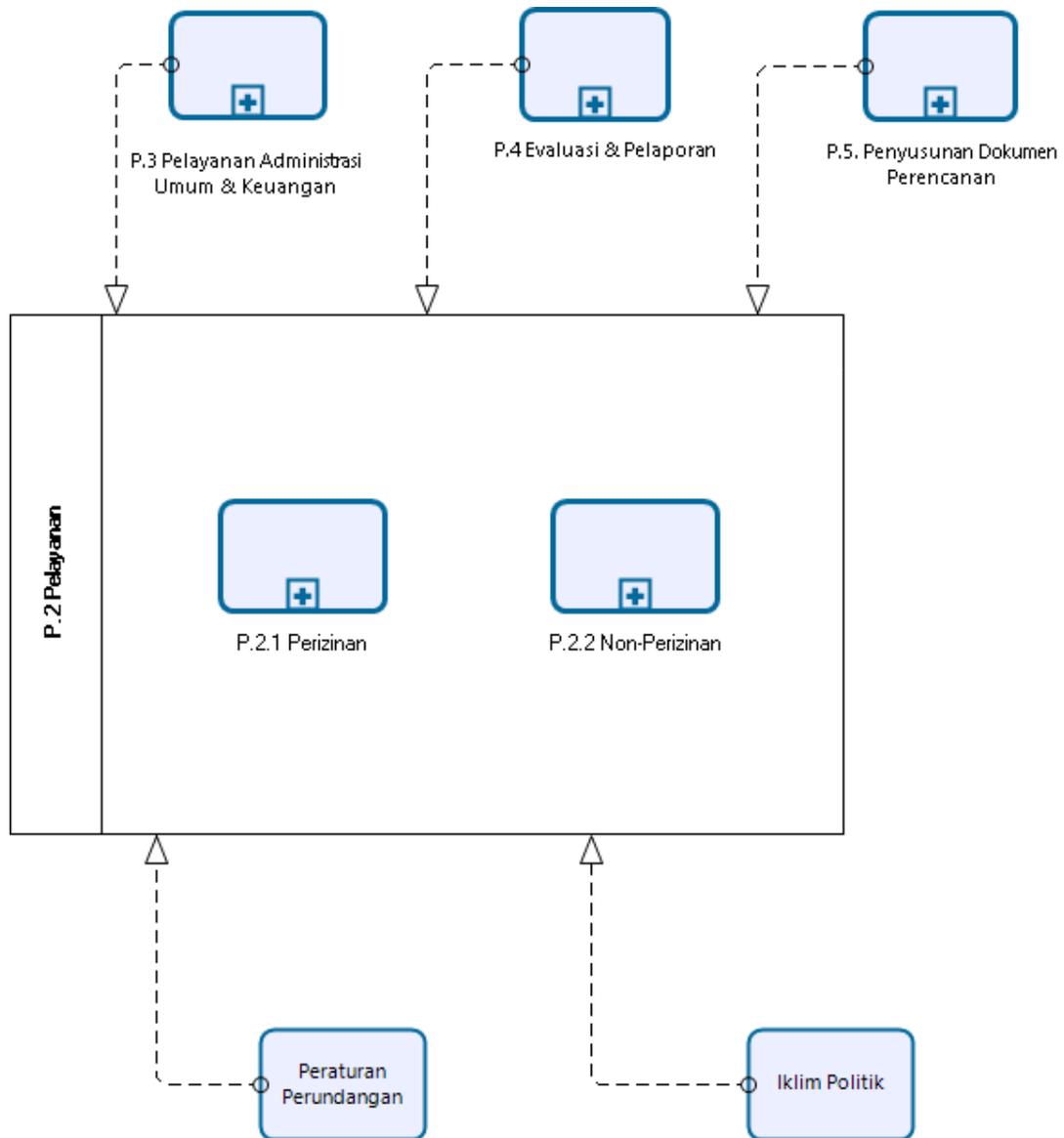
7 P.1.3 Pembinaan



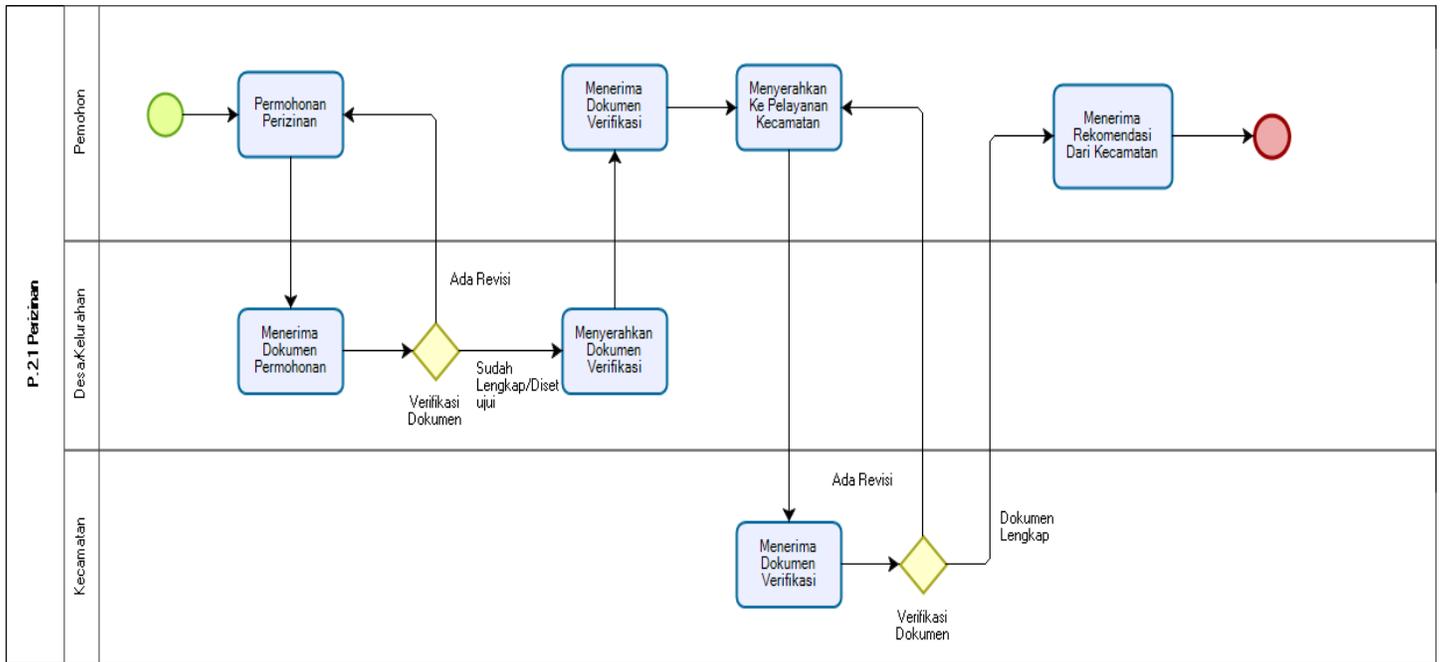
8 P.1.4 Monitoring dan Evaluasi



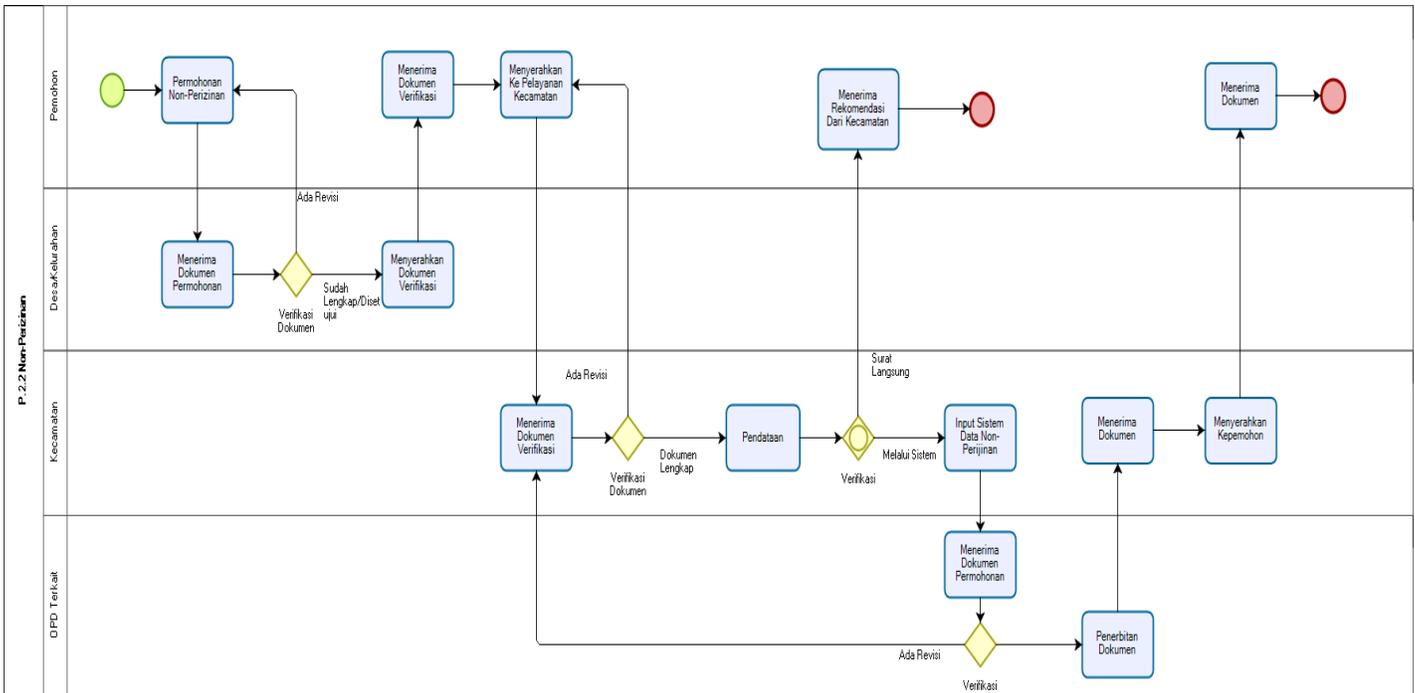
9 P.2 Pelayanan



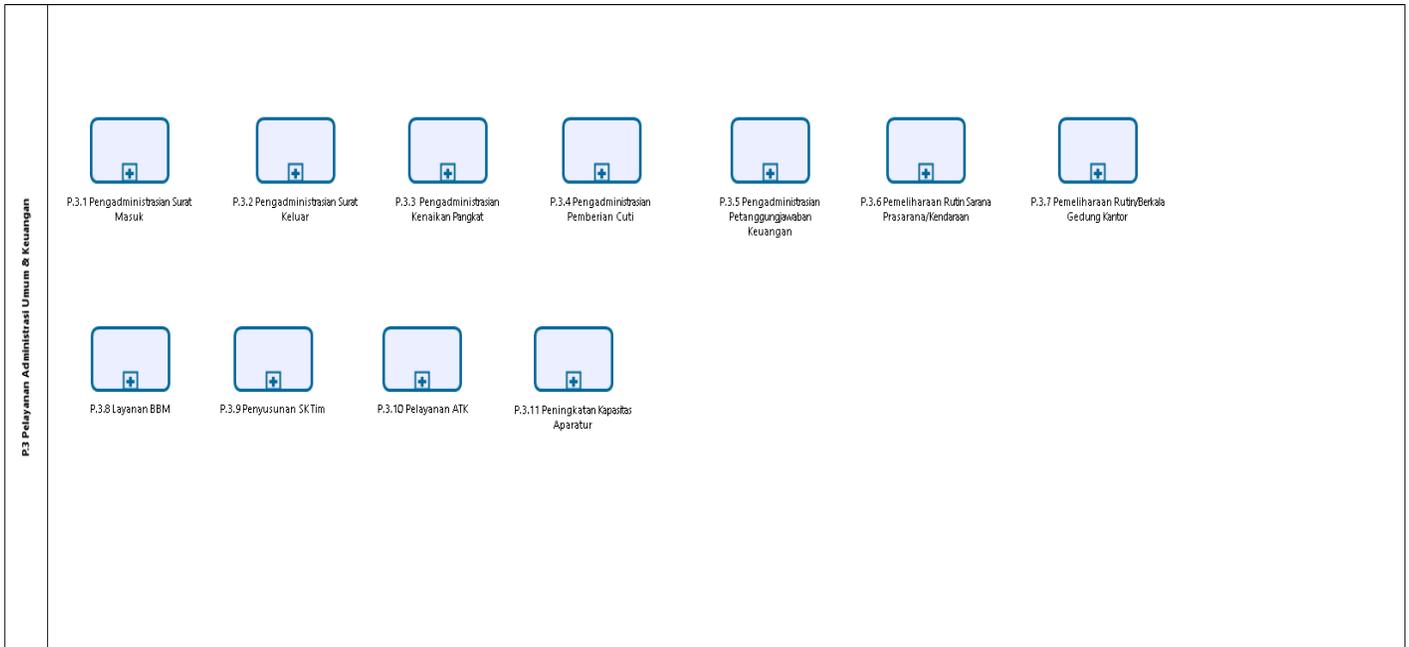
10 P.2.1 Perizinan



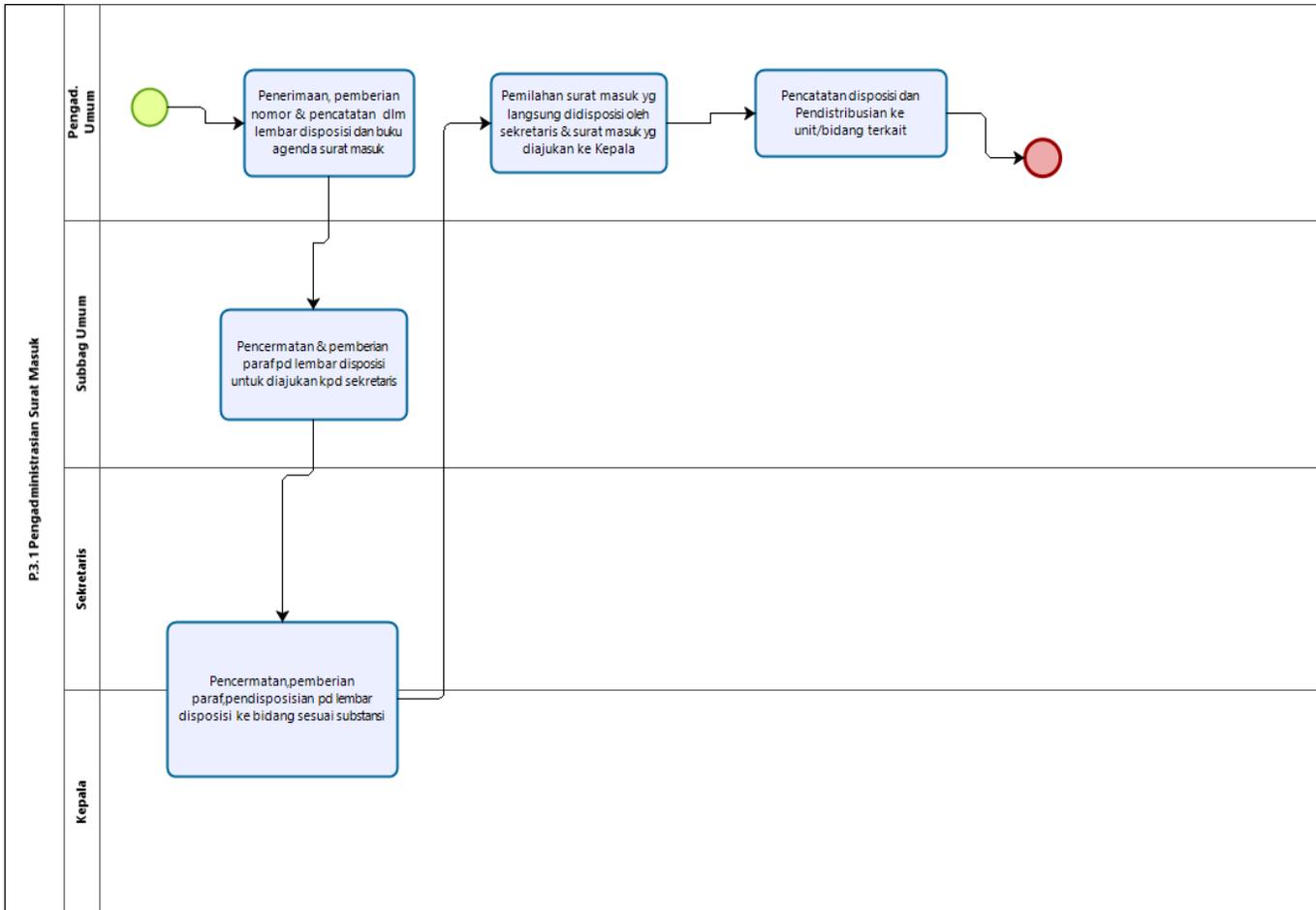
11 P.2.2 Non-Perizinan



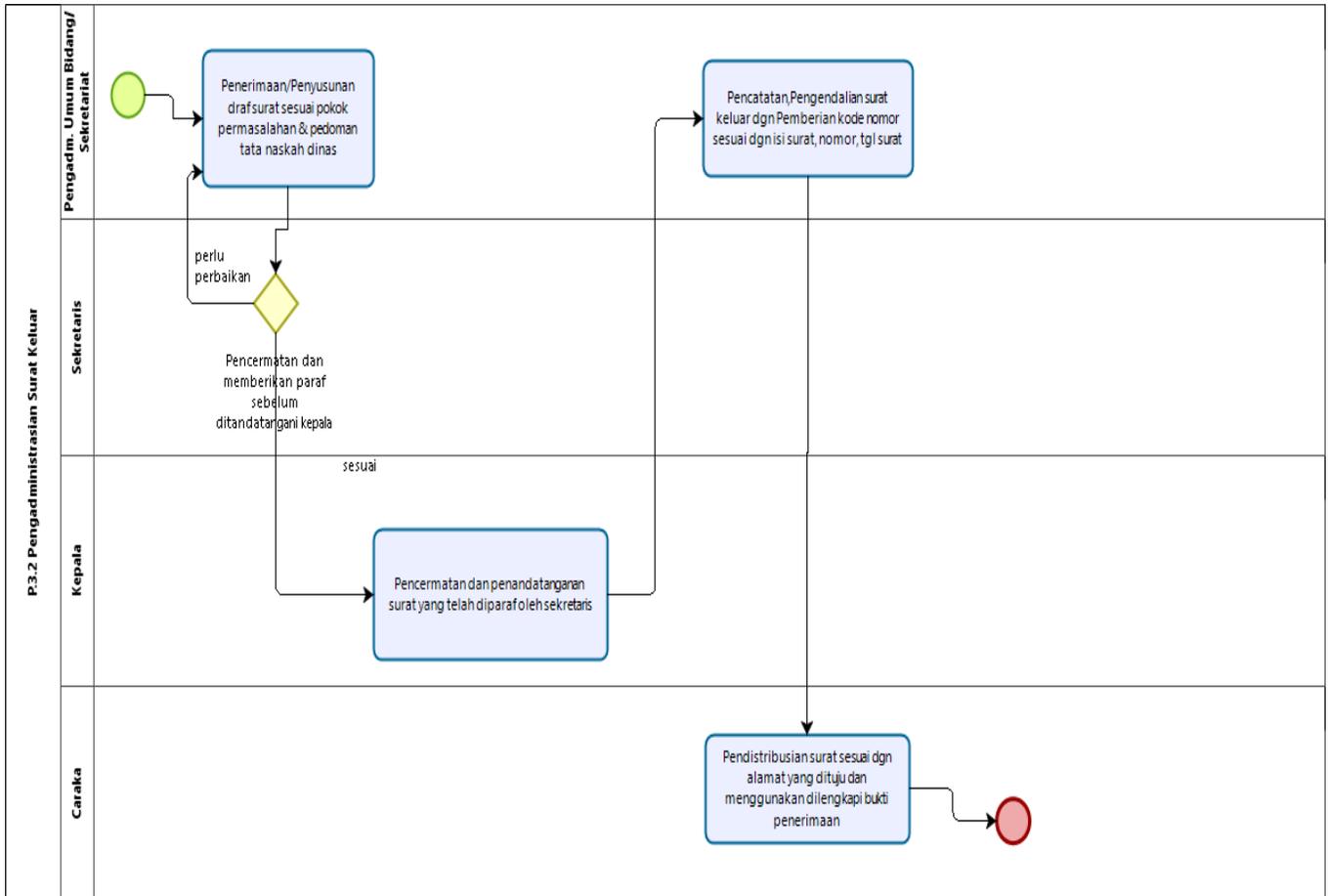
12 P.3 Pelayanan Administrasi Umum & Keuangan



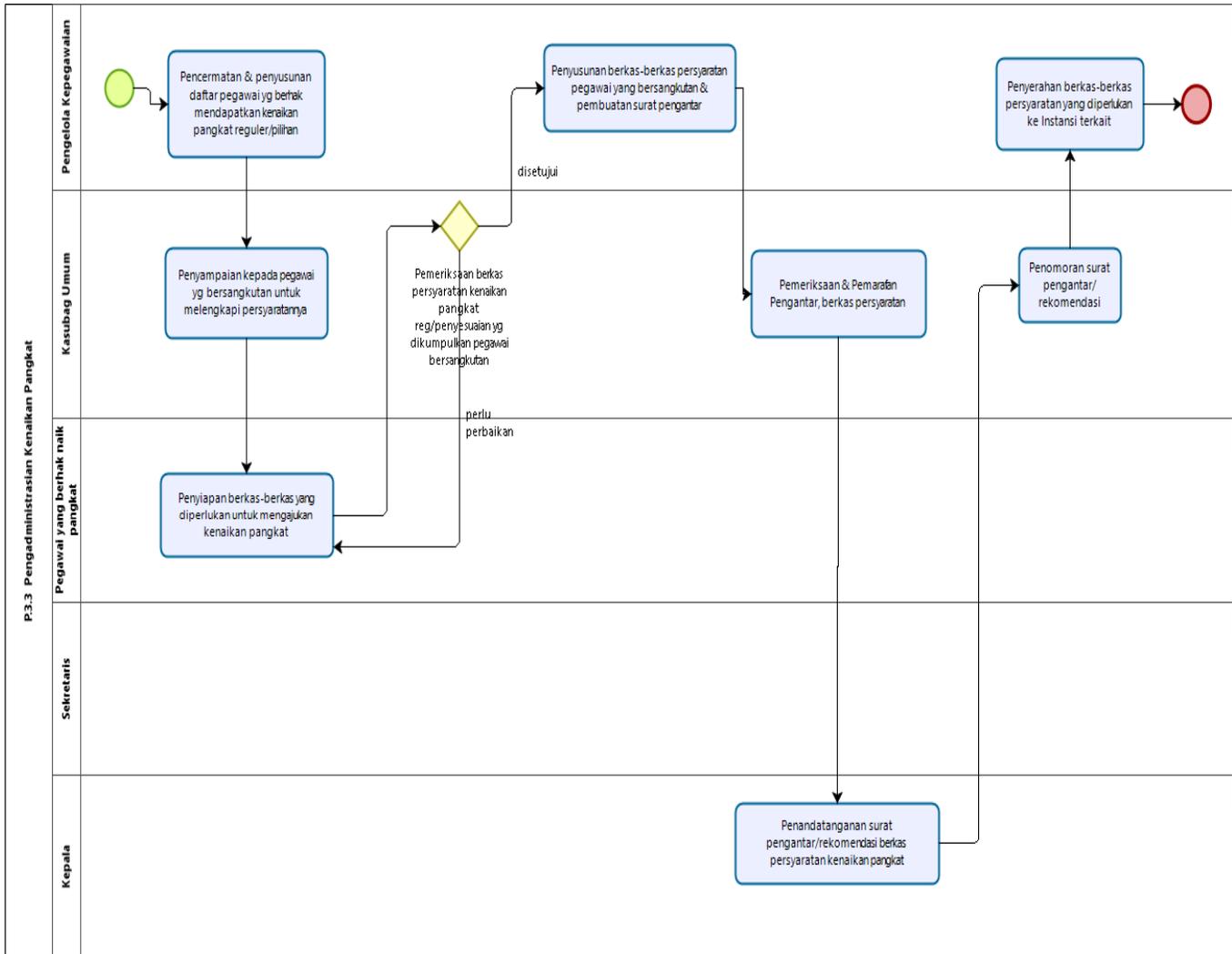
13 P.3.1 Pengadministrasian Surat Masuk



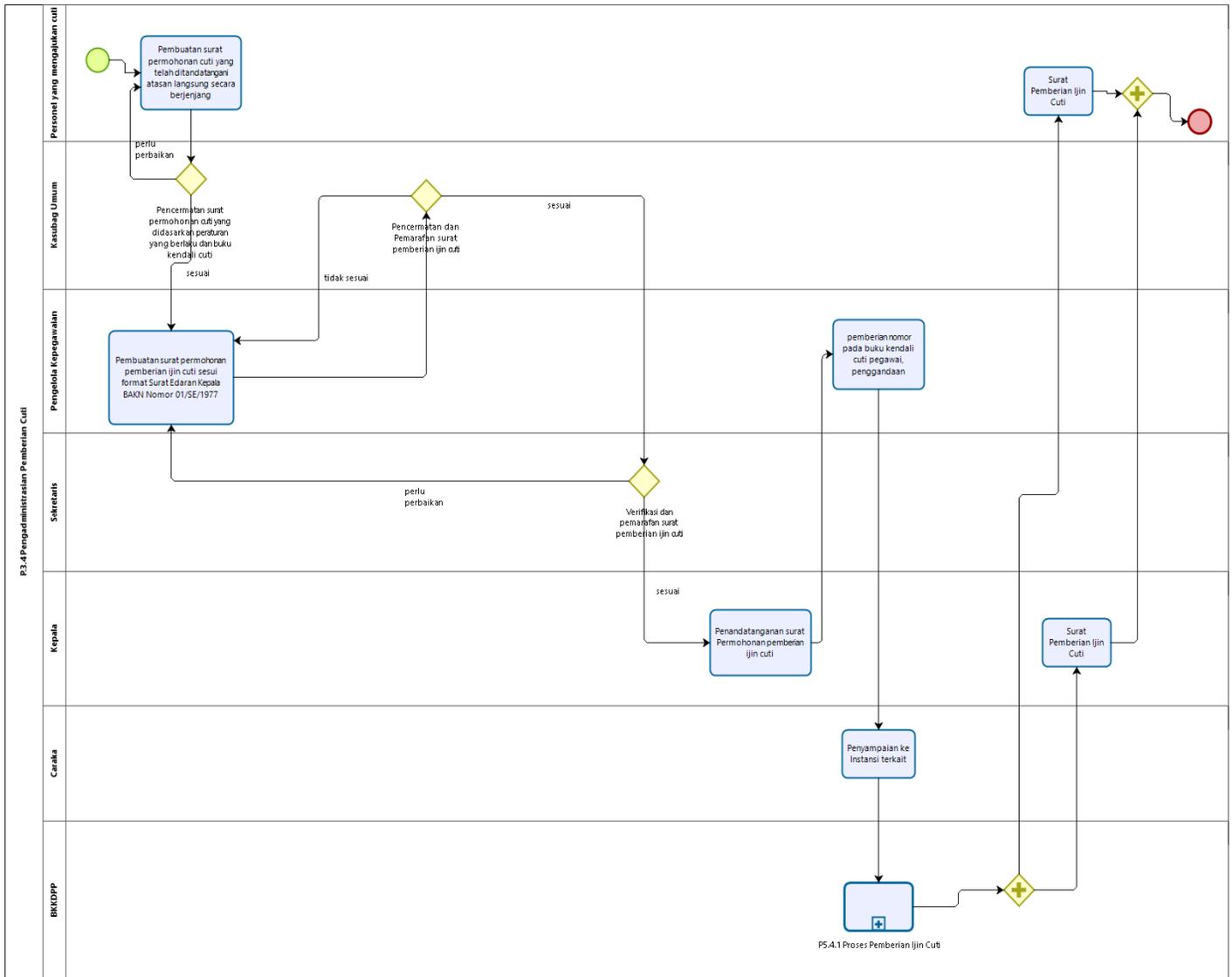
14 P.3.2 Pengadministrasian Surat Keluar



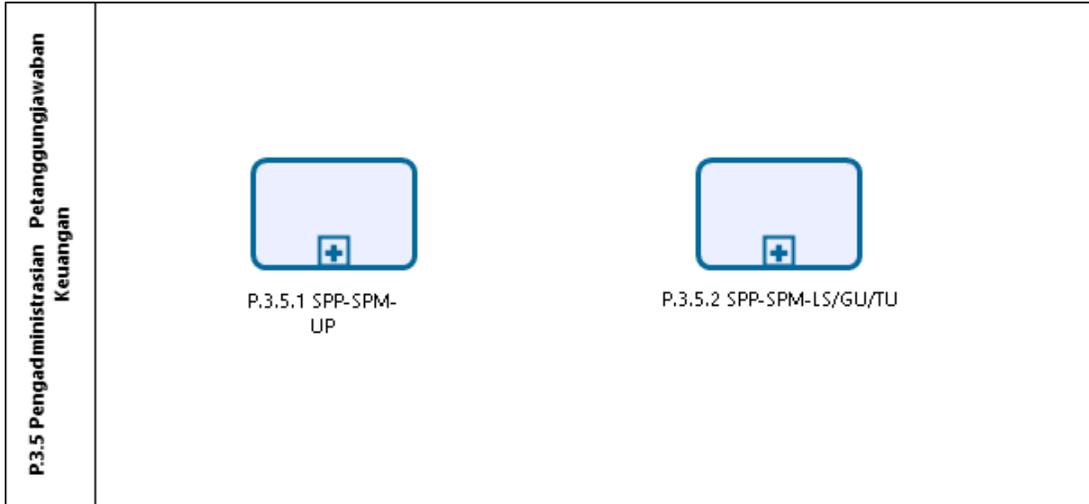
15 P.3.3 Pengadministrasian Kenaikan Pangkat



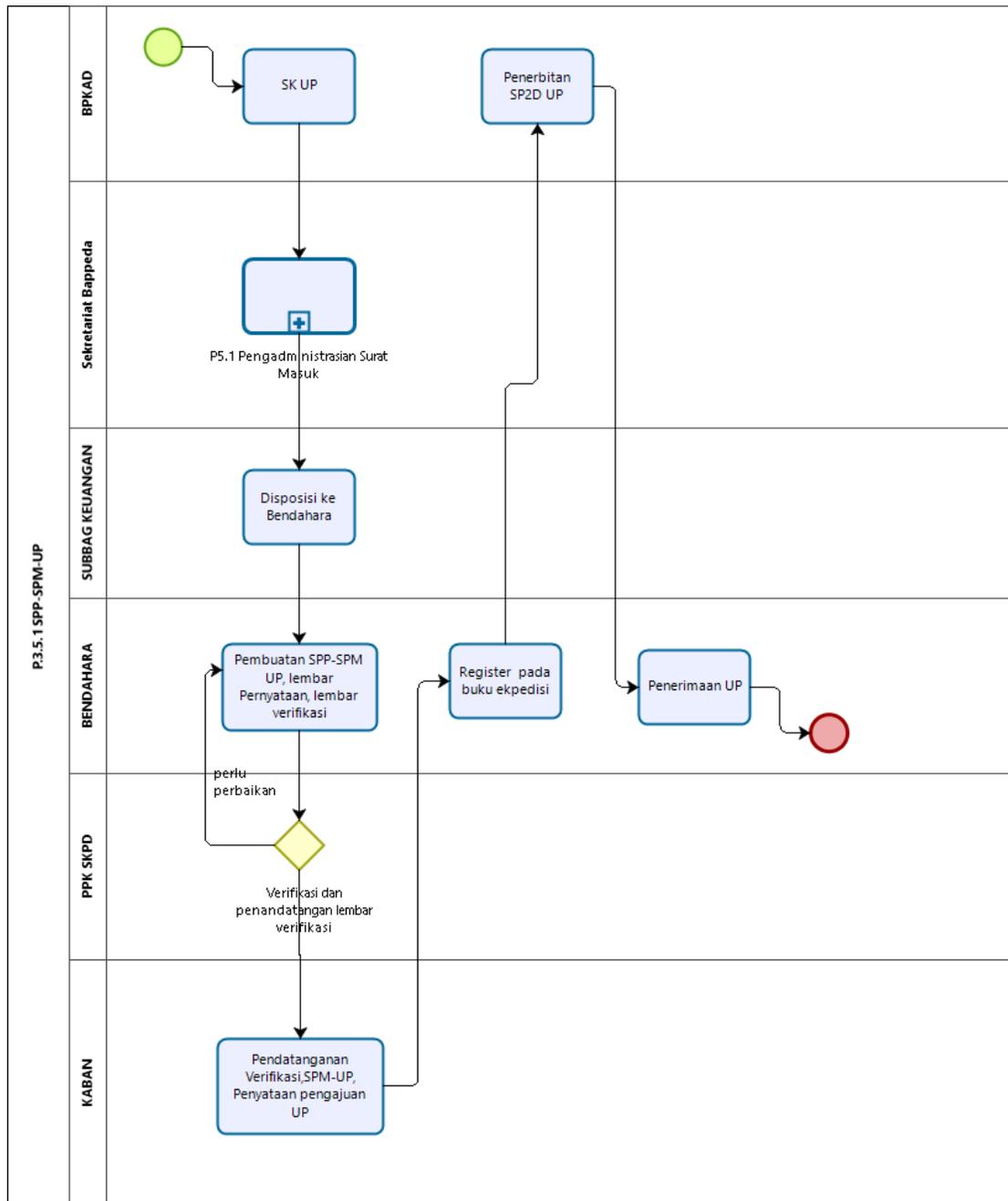
16 P.3.4 Pengadministrasian Pemberian Cuti



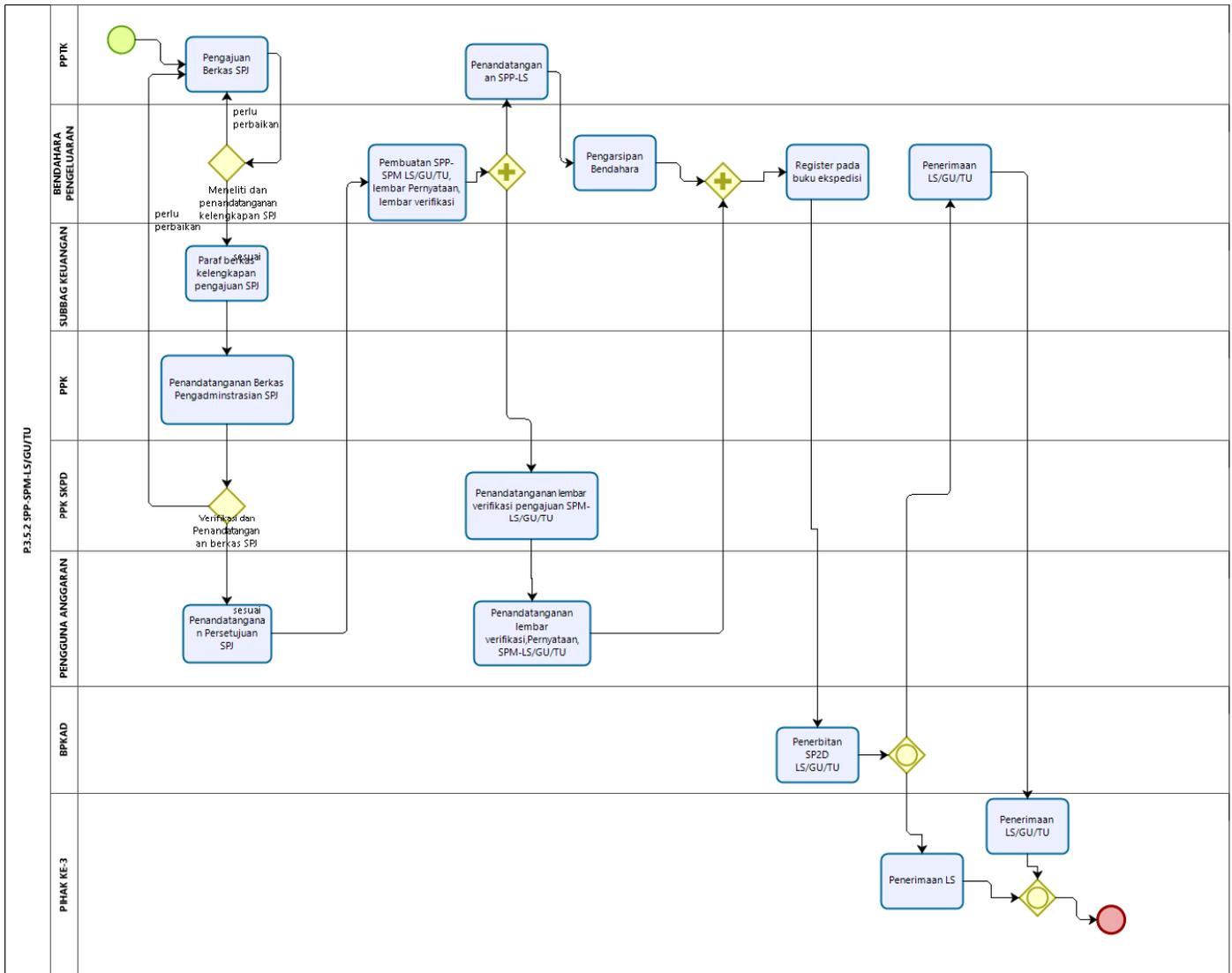
17 P.3.5 Pengadministrasian Petanggungjawaban Keuangan



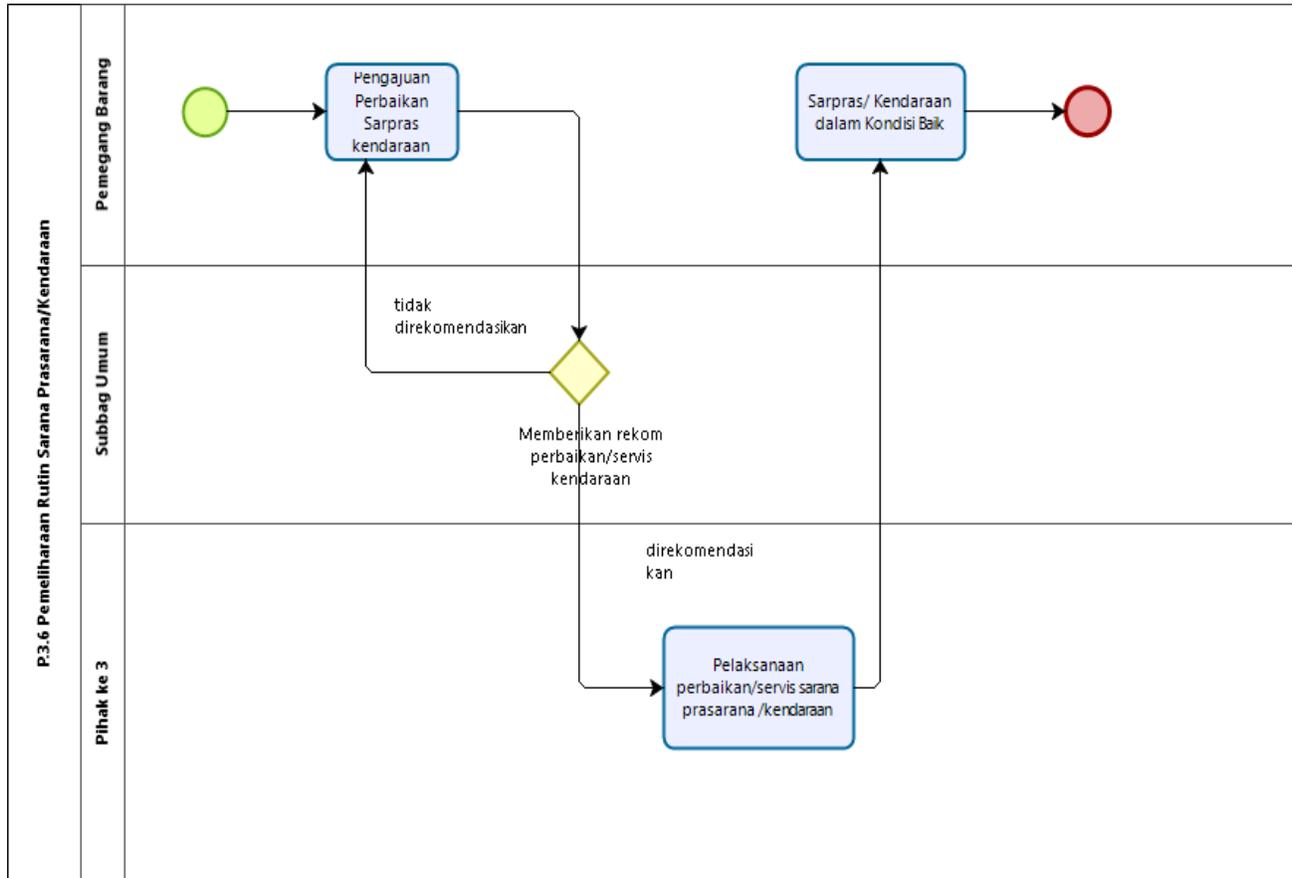
18 P.3.5.1 SPP-SPM-UP



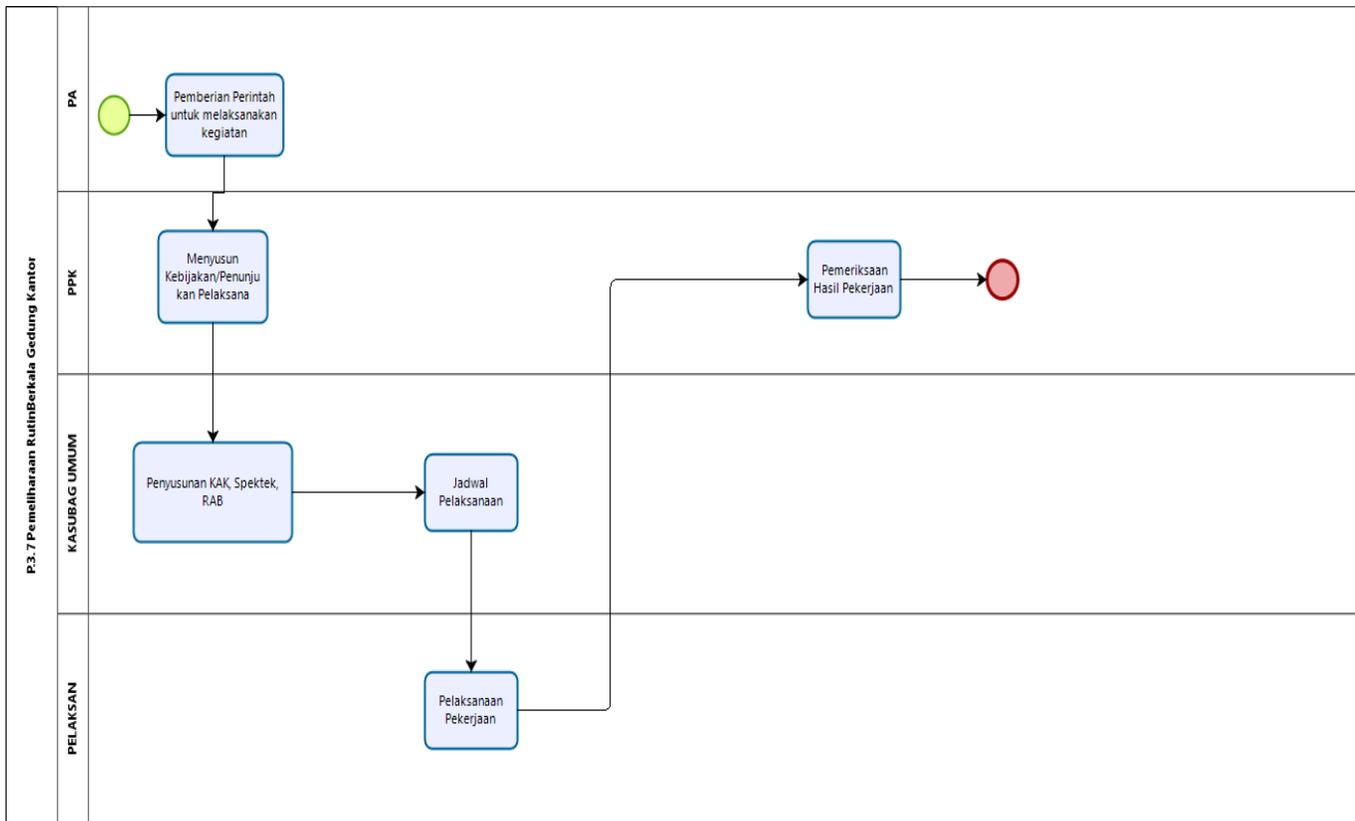
19 P.3.5.2 SPP-SPM-LSGUTU



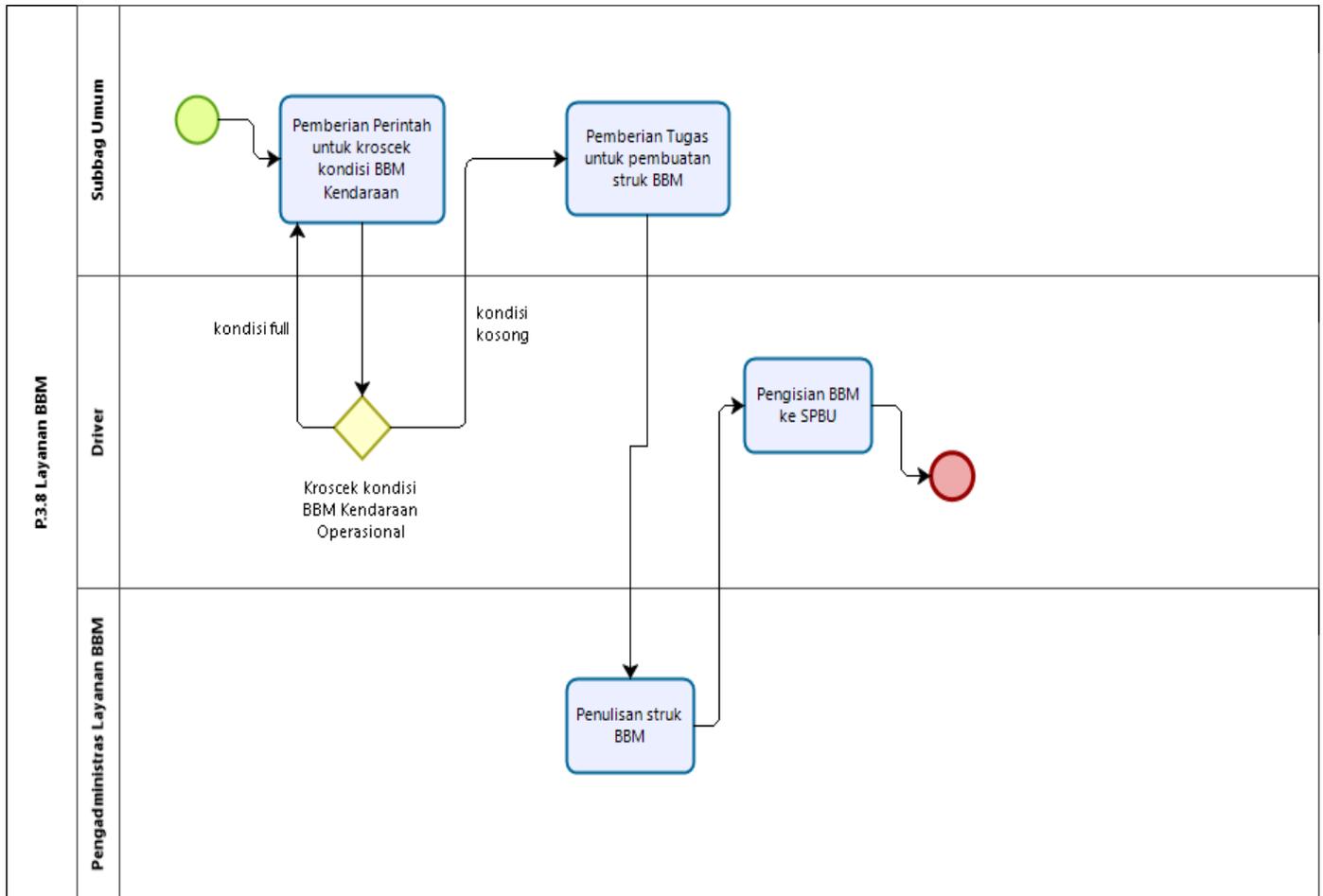
20 P.3.6 Pemeliharaan Rutin Sarana PrasaranaKendaraan



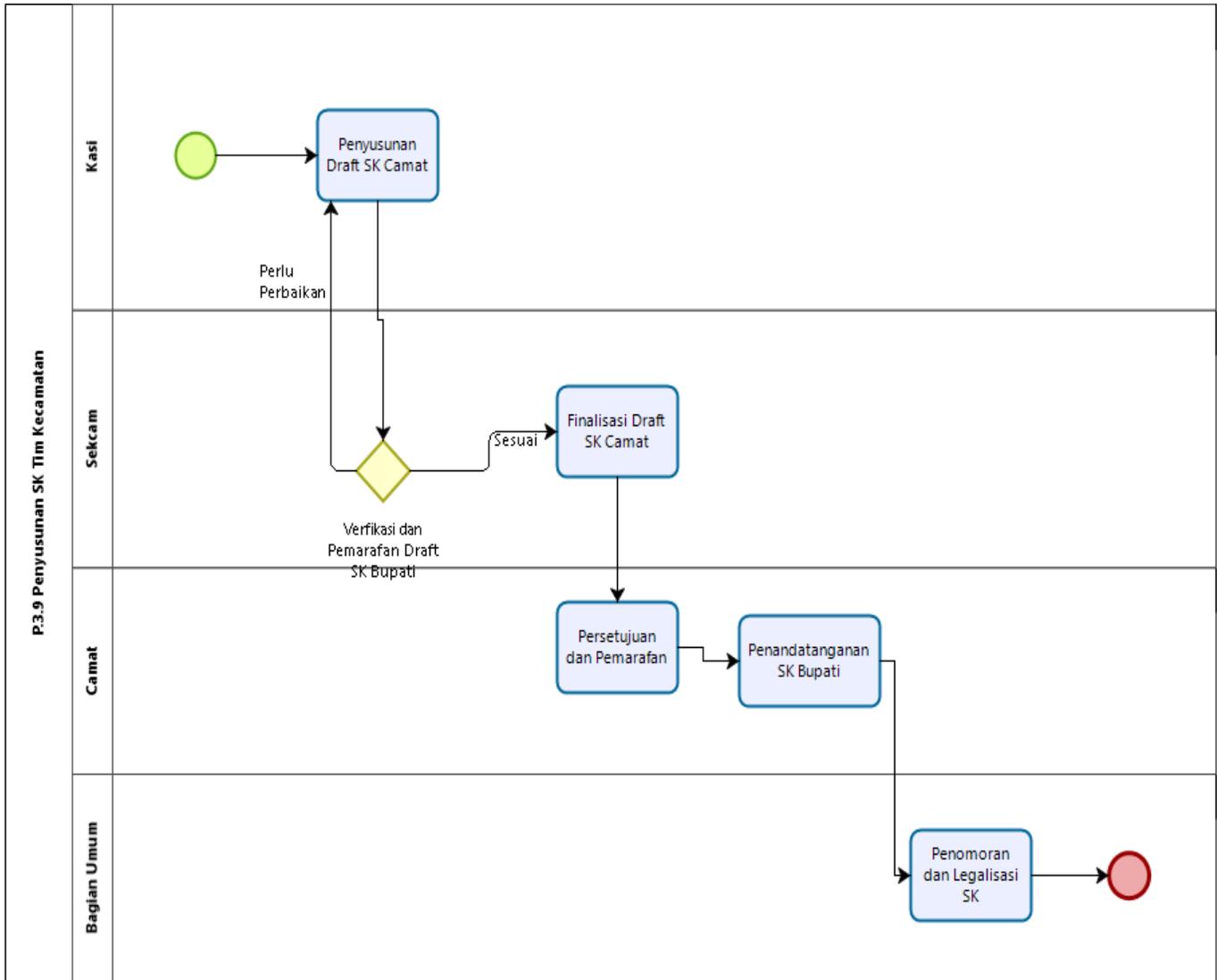
21 P.3.7 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor



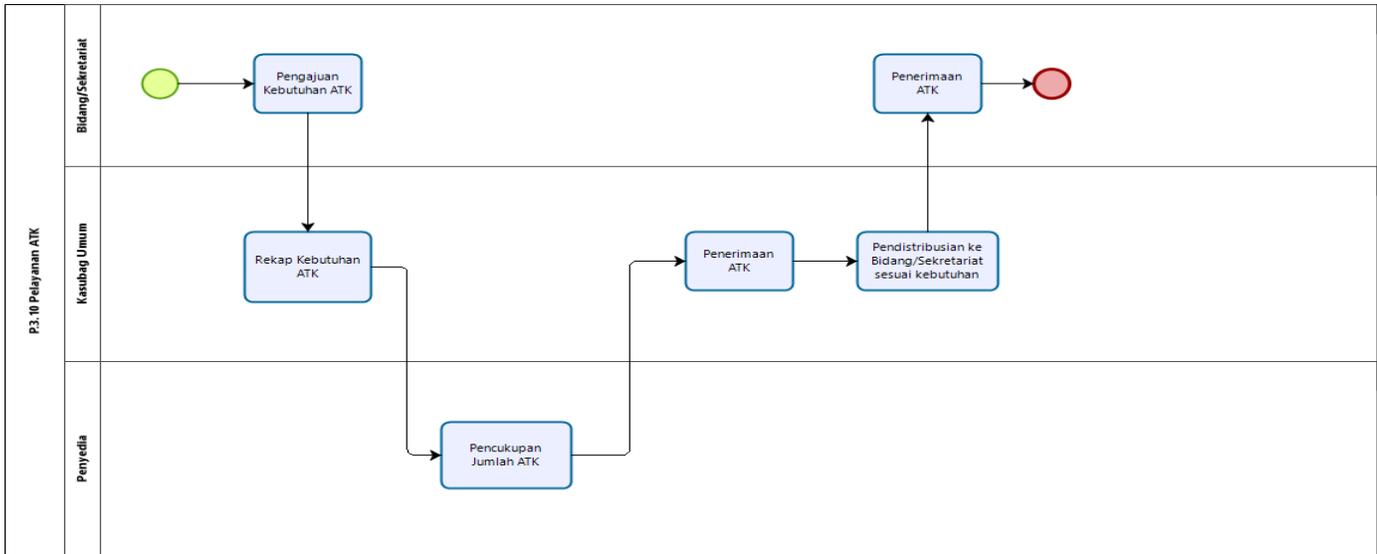
22 P.3.8 Layanan BBM



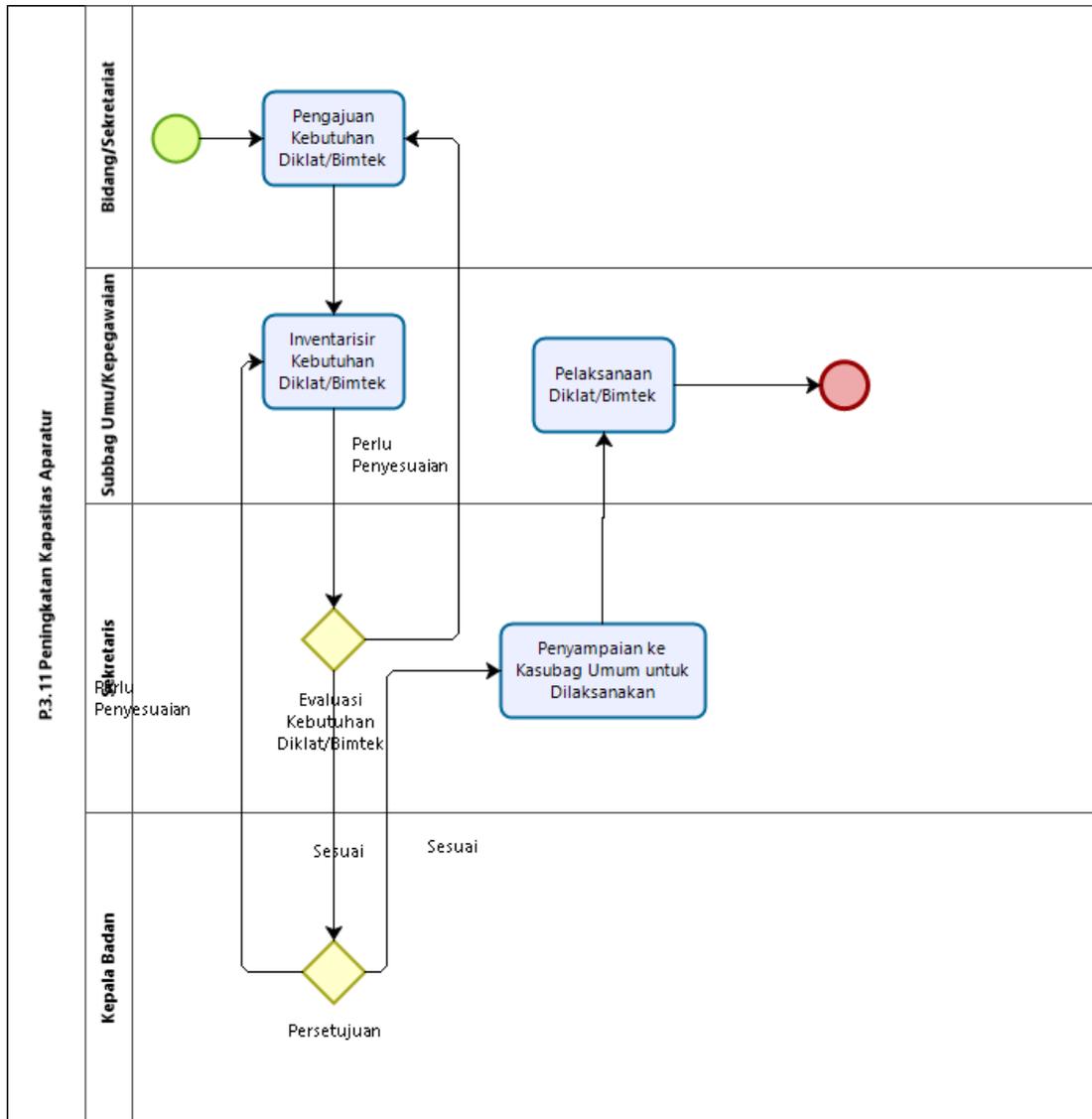
23 P.3.9 Penyusunan SK Tim Kecamatan



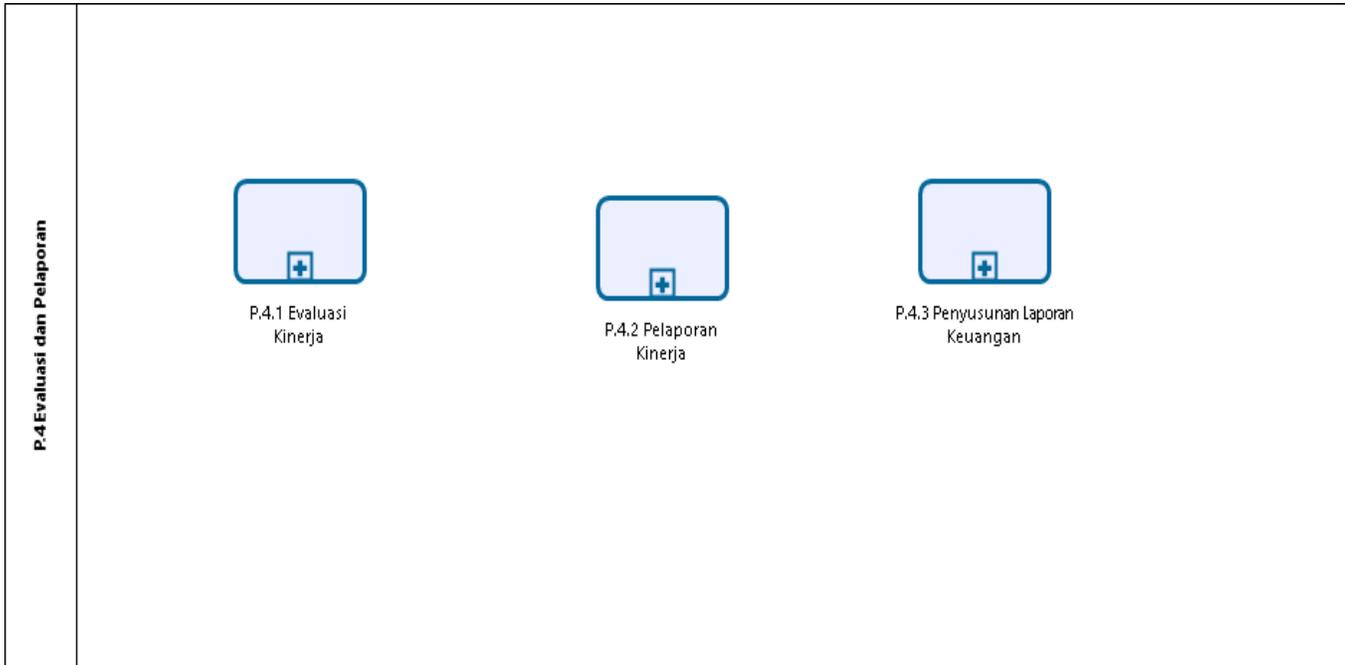
24 P.3.10 Pelayanan ATK



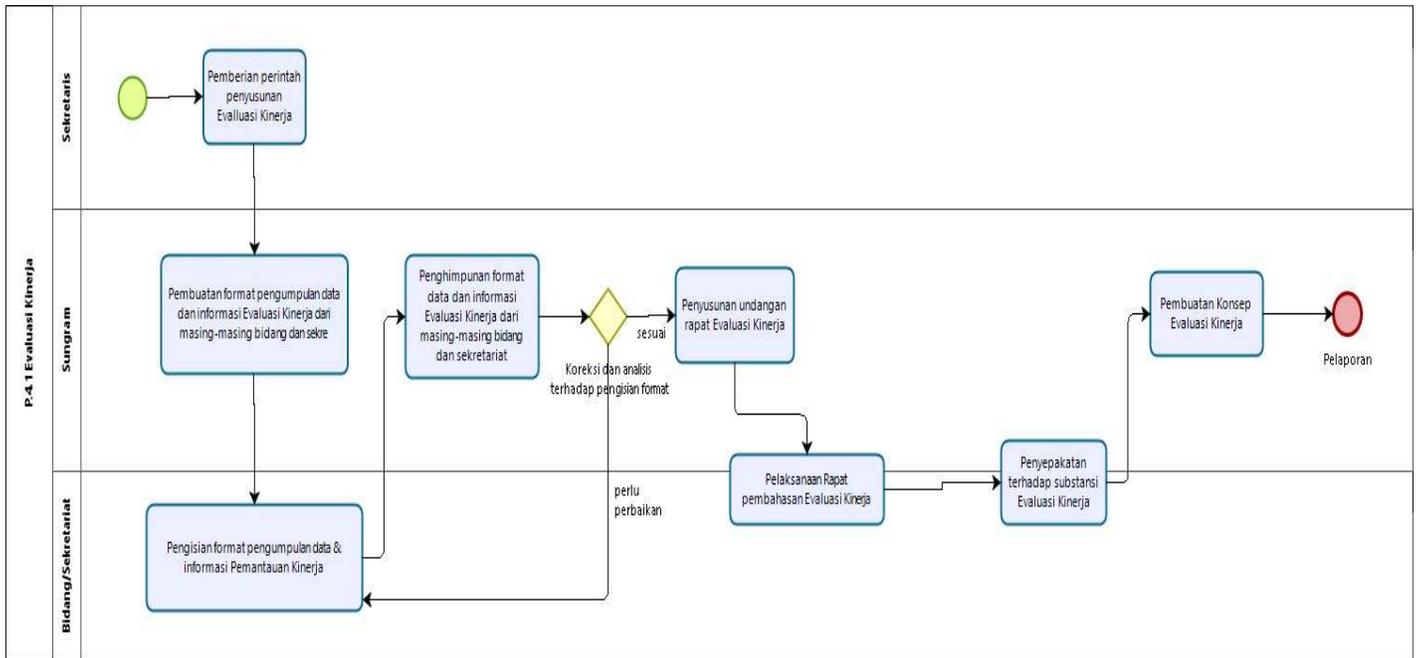
25 P.3.11 Peningkatan Kapasitas Aparatur



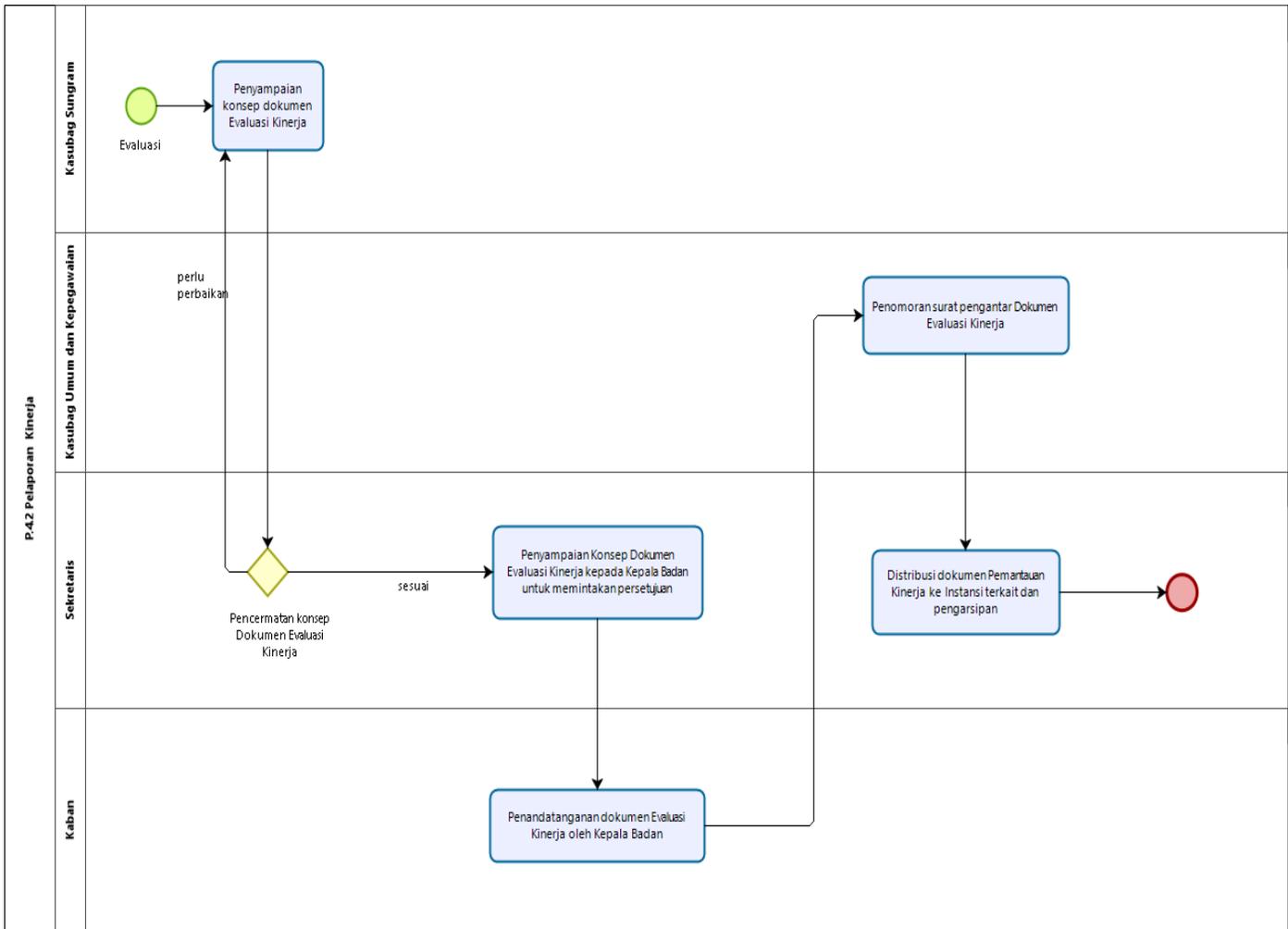
26 P.4 Evaluasi dan Pelaporan



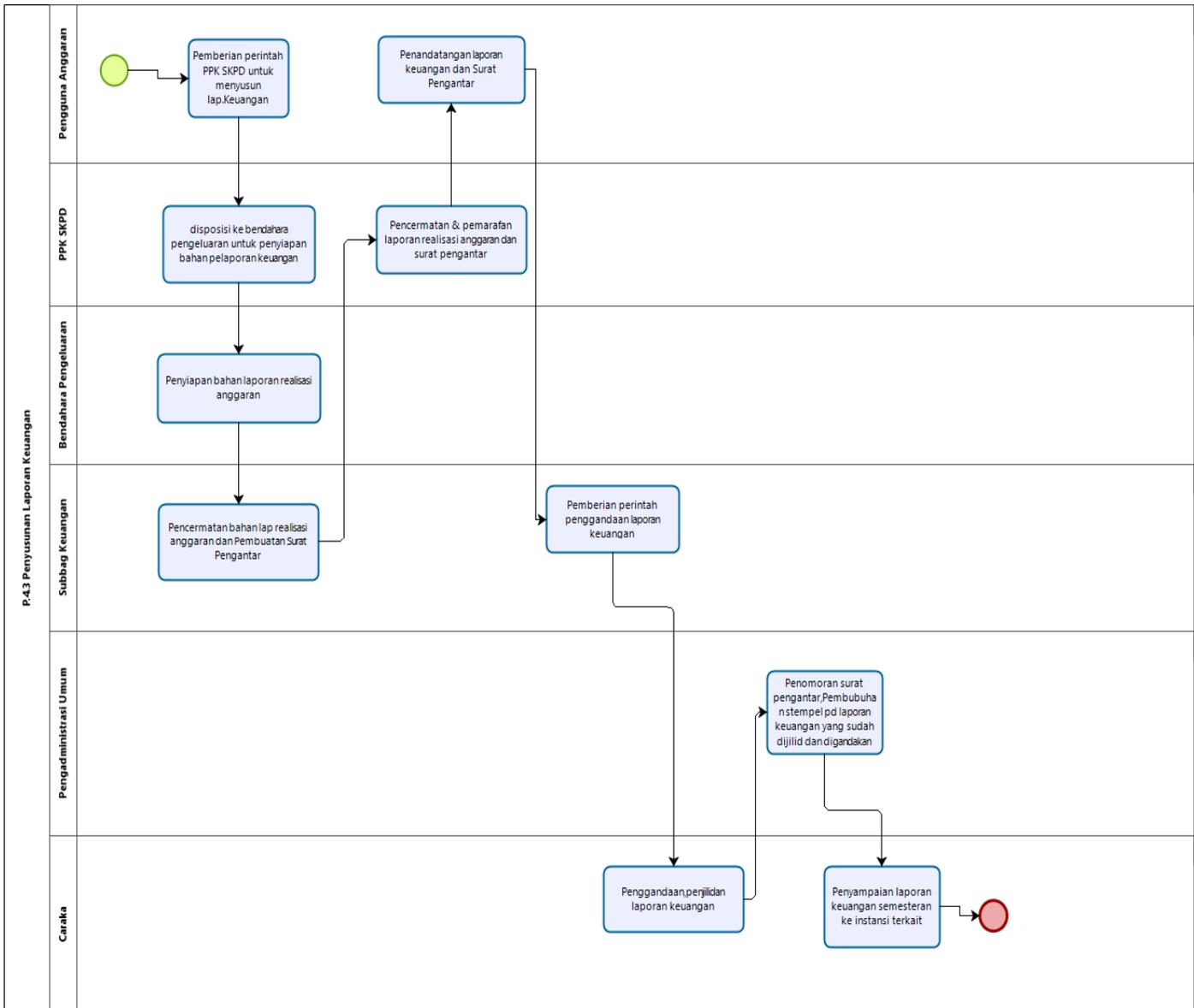
27 P.4.1 Evaluasi Kinerja



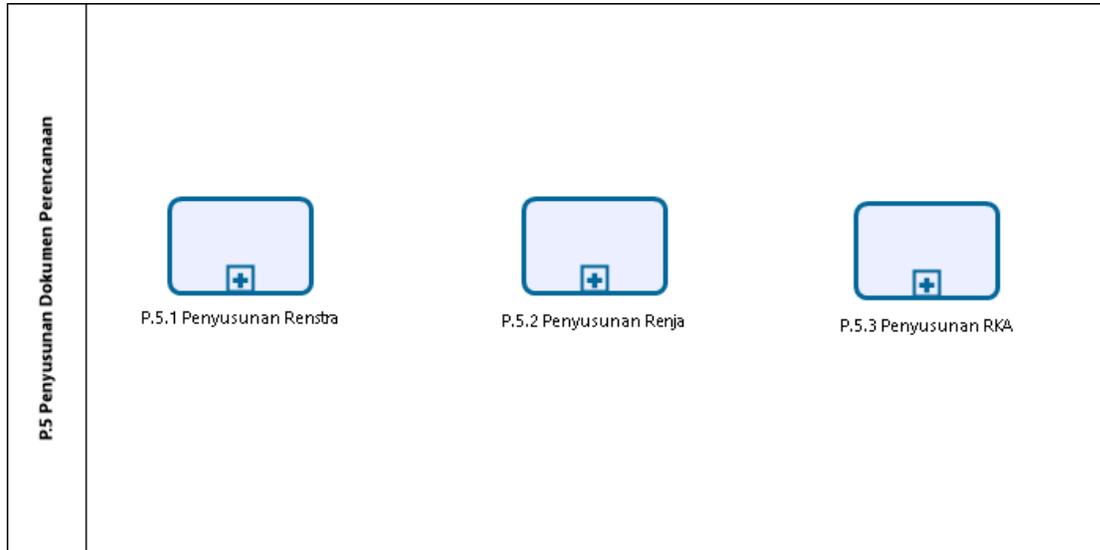
28 P.4.2 Pelaporan Kinerja



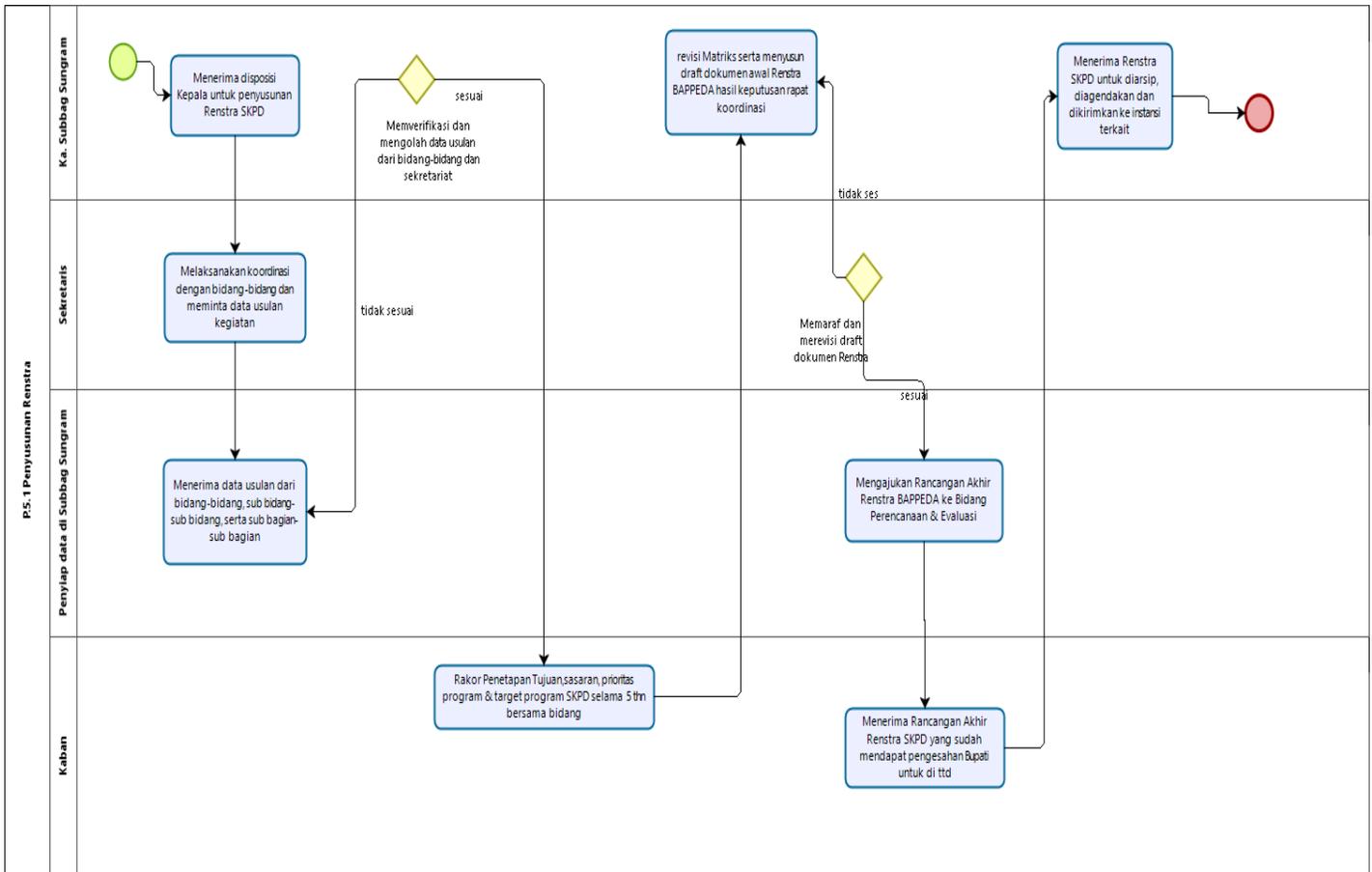
29 P.4.3 Penyusunan Laporan Keuangan



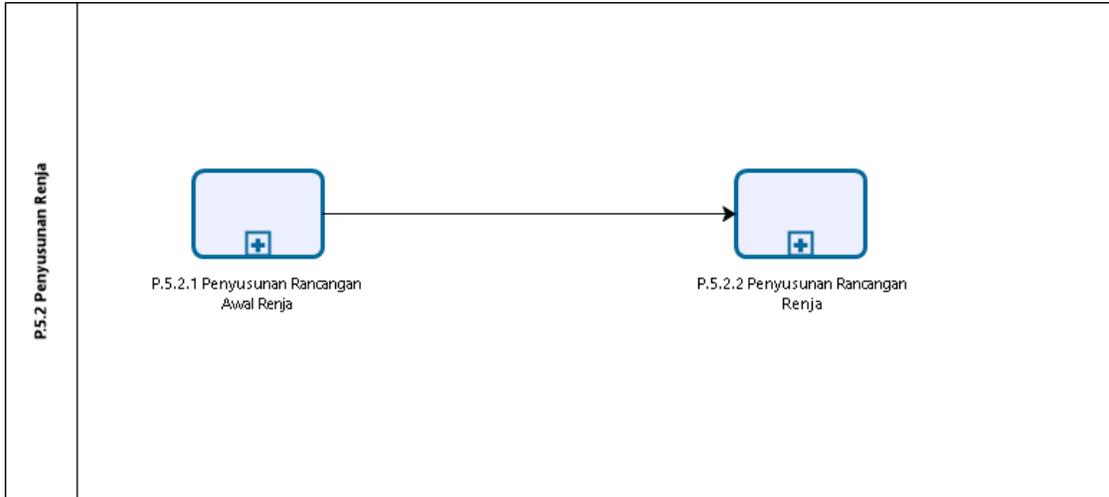
30 P.5 Penyusunan Dokumen Perencanaan



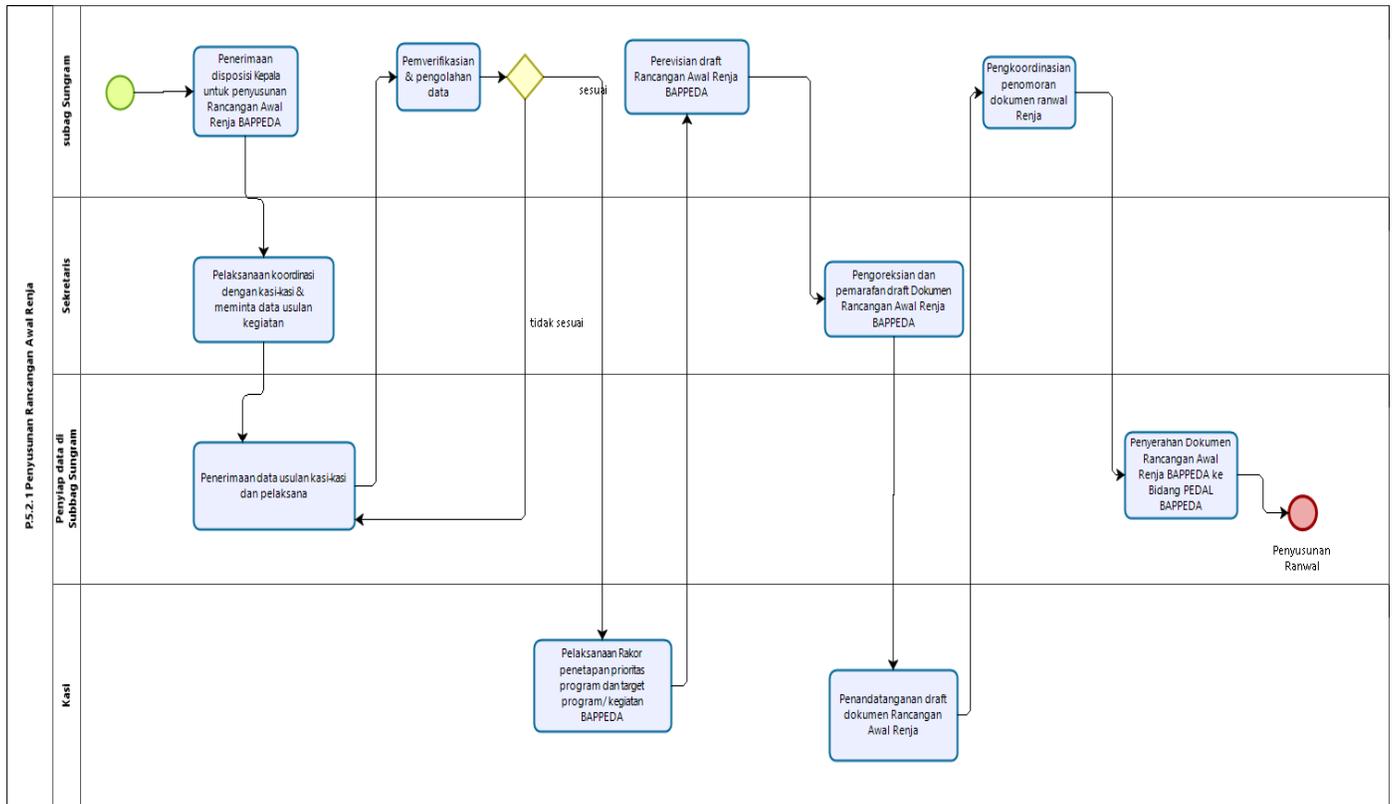
31 P.5.1 Penyusunan Renstra



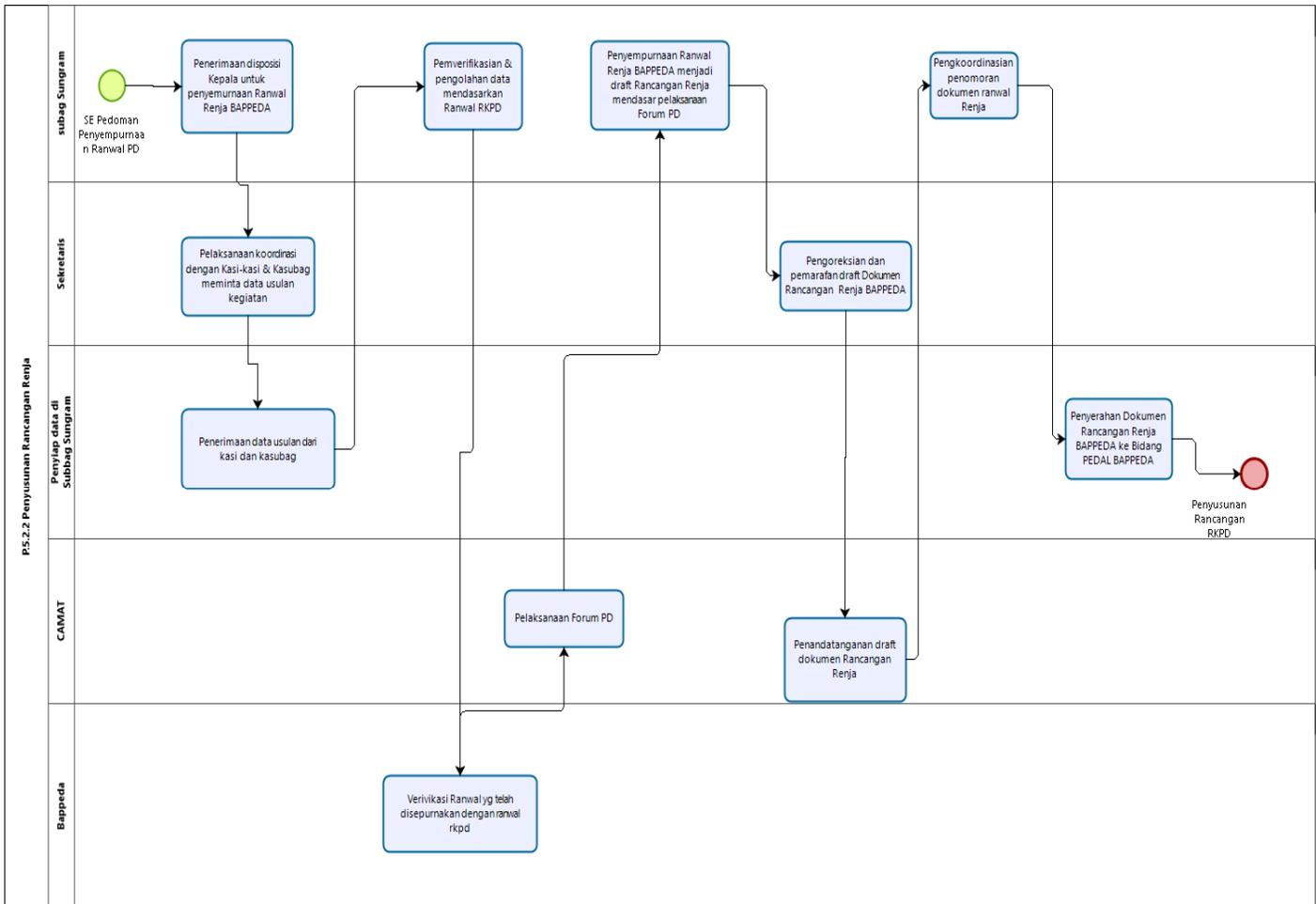
32 P.5.2 Penyusunan Renja



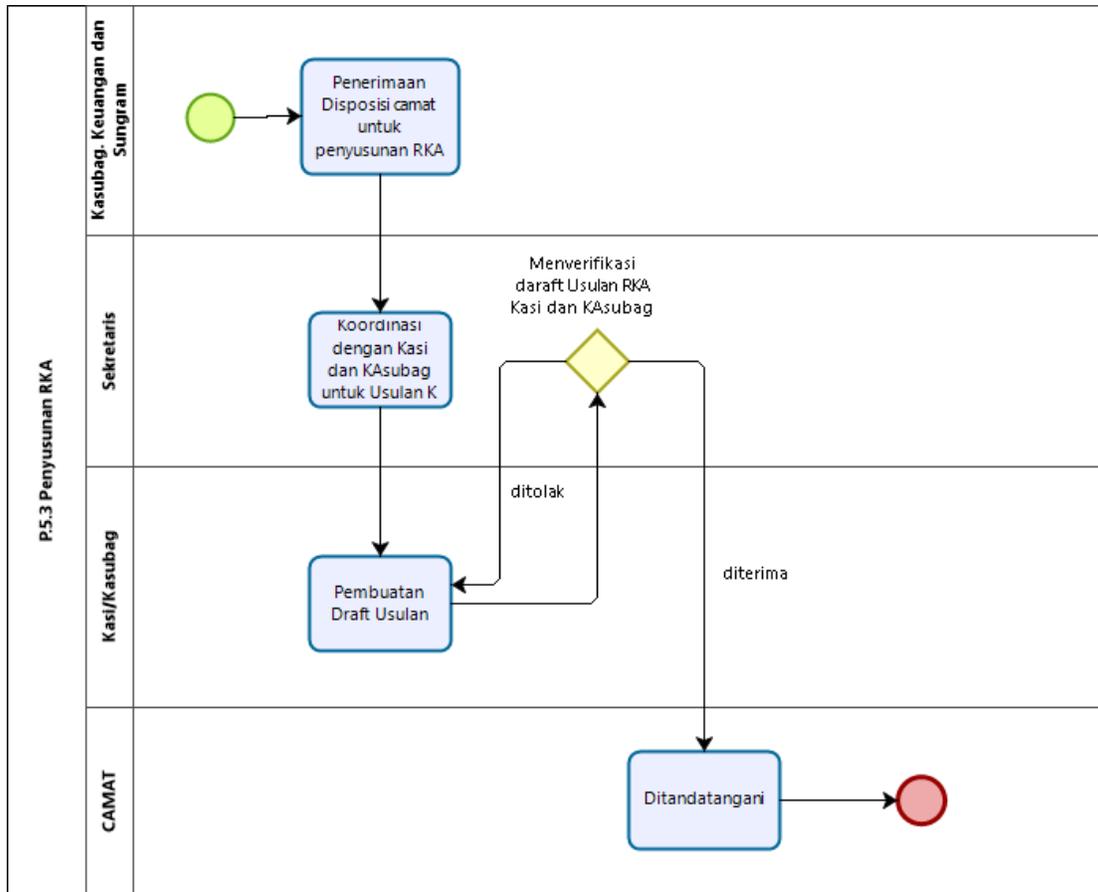
33 P.5.2.1 Penyusunan Rancangan Awal Renja



34 P.5.2.2 Penyusunan Rancangan Renja



35 P.5.3 Penyusunan RKA



36 PETA RELASI

